

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial. Sumber daya hutan dapat menjadi modal pembangunan suatu negara melalui ragam kekayaan plasma nutfah yang ada di dalamnya. Selain itu hutan juga berfungsi sebagai penyangga kehidupan dengan menjaga keseimbangan alam atau lingkungan hidup. Berbagai kebutuhan manusia juga dapat diperoleh dari hutan diantaranya adalah kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan kesehatan serta kebutuhan lainnya.

Di dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 1 angka 2 disebutkan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan pada pasal 1 angka 3 disebutkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Menurut Achirrudin (2011) Indonesia memiliki 120,35 juta hektar sumber daya hutan yang kaya akan ragam spesies dan ragam tipe ekosistem (mega *biodeversity*). Indonesia juga diakui dunia sebagai negara dengan potensi sumber daya hutan yang sangat besar dan menyimpan keragaman hayati tertinggi di dunia. Tercatat keragaman tersebut antara lain adalah adanya 500 spesies mamalia, 1.500 spesies burung, dan 10 ribu spesies pohon, sehingga bisa dikatakan hutan Indonesia mampu mewakili sekitar 10% hutan alam tropika humida di dunia (Na'iem, 2004 dalam Yuwono, 2006).

Dari aspek sosial, hutan di Indonesia juga merupakan rumah serta tempat untuk bersosialisasi antar masyarakat. Menurut data Departemen Kehutanan 2006 dalam Ansori 2009, 48.8 juta jiwa atau 12% dari total penduduk Indonesia tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kemudian jika berdasarkan data Center for Economic and Social Studies (CESS) 2005 dalam Aji dkk, 2011 mengungkapkan bahwa sekitar 50% dari total 32 juta jiwa penduduk miskin Indonesia tinggal di kawasan hutan. Penduduk tersebut umumnya hidup dengan mengusahaka

pertanian hutan. Menurut Riyanto (2004) kemiskinan ini terjadi salah satunya karena masyarakat sekitar hutan hanya mendapatkan manfaat minimal dalam kegiatan pengelolaan eksploitasi sumber daya hayati hutan yang kaya oleh pihak swasta maupun badan negara di daerahnya.

Negara telah membagi dan mengatur jenis-jenis hutan sesuai yang tertulis dalam Undang-undang (UU). Salah satu jenis hutan yang ada adalah hutan produksi, yang diperuntukkan untuk memproduksi hasil hutan. Perum Perhutani adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pengelolaan hutan produksi di Indonesia sejak tahun 1972. Penguasaan lahan Perum Perhutani adalah sebesar 2.446.907,27 ha tersebar di Pulau Jawa dan Madura. Setelah 30 tahun, banyak proses pembelajaran yang didapat perum perhutani dalam mengelola sumber daya hutan. Hingga lahirlah paradigma baru pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui kesadaran berbagi hasil, berbagi peran dan berbagi tanggung jawab. Sebagai koreksi, pengelolaan Perum Perhutani masa lalu cenderung *timber oriented*, yang mana kurang memperhitungkan variabel sosial ekonomi dan budaya yang ada di dalam hutan. Ini kemudian memunculkan disparitas atau ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya hutan dan meningkatnya konflik pengelolaan dengan masyarakat sekitar hutan. Puncaknya pada awal era reformasi yang berkejolak terjadi penjarahan kayu di hutan Perum Perhutani hingga mengakibatkan kerusakan yang sangat parah di lahan hutan Pulau Jawa.

Wujud dari hasil paradigma baru di atas ialah diluncurkannya Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perum Perhutani pada tahun 2001. Pada program PHBM ini Perum Perhutani memasukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai bagian dari sasaran aktivitasnya. Sasaran ini dilakukan dengan ikut menyertakan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dalam pengelolaan hutan. Tujuannya agar terjadi perubahan *mindset* masyarakat desa hutan untuk lebih memahami perlunya menjaga kelestarian sumber daya hutan serta pemanfaatan hutan Indonesia yang kaya dengan lebih bijak. Selain itu diharapkan PHBM juga bisa memberikan efek yang positif lain bagi Perum

Perhutani dan masyarakat desa hutan seperti adanya penyerapan tenaga kerja untuk penanaman dan pemeliharaan pohon hutan kembali, meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia serta terjalinnya hubungan yang sinergis antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan.

Hingga kini setelah lebih dari limabelas tahun pelaksanaan program PHBM di seluruh Hutan Jawa, cukup banyak manfaat ekonomi yang diperoleh negara. Manfaat tersebut antara lain ialah berdasarkan data dari Perum Perhutani 2014 bahwa dari tahun 2002 hingga 2012 program PHBM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6.304.467 orang dengan nilai sebesar Rp2.705,71 miliar. Selain itu hasil dari pendapatan produksi tanaman pangan yang dilakukan dengan sistem agroforestri atau tumpangsari di lahan hutan adalah sebesar Rp7.469,09 Miliar,- atau rata-rata pendapatannya Rp679,01 miliar/tahun.

Meskipun demikian, beberapa peneliti masih menilai bahwa program PHBM belum berjalan sesuai harapan. Khususiyah (2013) mengungkapkan bahwa keberhasilan program PHBM di DAS Konto belum sesuai dengan standar karena masih adanya pencurian kayu, perambahan dan kebakaran hutan. Achirrudin (2011) juga menambahkan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang terhadap manfaat PHBM, sehingga banyak terjadi pelanggaran oleh masyarakat.

Kebijakan PHBM yang telah ditetapkan oleh Perum Perhutani umumnya berlangsung sejak tahun 2001 yaitu setelah keluarnya surat keputusan direksi Perum Perhutani. Namun program ini tidak dapat dilaksanakan di Kabupaten Malang secara langsung. Menurut Kusdamayanti (2008) terjadi konflik kebijakan antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Perum Perhutani. Pemda meminta Perum Perhutani agar program PHBM lebih disesuaikan dan dilakukannya beberapa perubahan. Setelah beberapa tahun, konflik tersebut pun dapat diselesaikan melalui adanya perundingan. Pada tahun 2004 setelah terjadi perdebatan panjang disepaktilah pelaksanaan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan (PKPH) sebagai bentuk baru dari program PHBM di Kabupaten Malang.

Desa Kucur adalah salah satu desa hutan yang berada di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Desa yang berbatasan dengan lahan hutan pinus milik Perum Perhutani ini tercatat ikut dalam program PKPH di Kabupaten Malang. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan sistem kemitraan bagi hasil antara

Perum Perhutani dengan petani hutan. Terdapat dua jenis kegiatan kemitraan yaitu kemitraan penggarap lahan “Tetelan” atau lahan hutan dan kemitraan penyadap getah pinus milik Perum Perhutani. Jumlah masyarakat desa hutan yang menjadi peserta program PKPH cukup banyak yaitu sekitar 150 orang. Masing-masing kegiatan kemitraan ini memiliki aturan yang berbeda namun jumlah peserta kegiatan penggarap lahan jauh lebih banyak daripada peserta kegiatan penyadapan pinus yang hanya 22 orang saja.

Sebelumnya sudah cukup banyak penelitian tentang topik kehutanan Indonesia utamanya yang membahas program PHBM. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Khususiyah dan Achirrudin diawal. Selain itu ada juga yaitu Theresia (2008) tentang Efektivitas pengelolaan hutan kolaboratif antara masyarakat dengan Perum Perhutani kasus PHBM di KPH Kuningan dan Majalengka Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, serta Anomsari (2015) tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat kasus di Kecamatan Karanggayam, Kebumen. Perbedaan yang mendasar dari penelitian sebelumnya adalah lokasi beserta penyesuainya terhadap kondisi lokasi yang berbeda. Selain itu pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk lebih mengungkap aspek kualitatif mengenai aksesibilitas petani untuk mendapatkan lahan garapan di hutan. Aksesibilitas merupakan awal dari dimulainya program ini dan jarang diungkap oleh peneliti sebelum-sebelumnya. Maka penelitian ini menarik dilakukan karena mencoba mengungkap bagaimana program PKPH dijalankan oleh masyarakat desa hutan dengan Perum Perhutani di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang telah berjalan selama lebih dari sepuluh tahun. Selain pelaksanaan program, dalam penelitian ini mencoba menganalisis tingkat kelestarian dan tingkat pendapatan petani anggota kemitraan yang merupakan tujuan utama dari pelaksanaan program.

### **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Seperti yang tertuang dalam Pedoman PHBM terbitan tahun 2009 bahwa maksud dan tujuan dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional. Dalam kemitraan ini setidaknya ada dua pihak utama dalam kemitraan yaitu Perum Perhutani dan petani anggota mitra atau masyarakat desa

hutan. Kedua pihak ini memegang peran masing-masing di dalam pelaksanaan PKPH dan memiliki kesetaraan posisi. Hafsa (1999) menjelaskan bahwa kemitraan pertanian merupakan salah satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada kesetaraan posisi tawar melalui terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan ketrampilan yang didasari rasa percaya antar mitra dan kelompok melalui sinergi kemitraan. Namun berdasarkan penelitian Ansori, dkk, 2009 terdapat ketidaksetaraan masyarakat dengan perhutani, kemitraan cenderung bersifat asimetris. Pihak Perhutani masih mendominasi karena merasa paling berhak dan bertanggung jawab dalam mengelola hutan di kawasannya.

Tidak semua dari masyarakat desa hutan terlibat dalam kemitraan di program PKPH, utamanya dalam aksesibilitas untuk menggarap lahan "Tetelan", seperti yang ada di Desa Kucur, Perum Perhutani menetapkan luas hutan untuk PKPH adalah seluas sekitar 15 ha. Sedangkan jumlah dari kepala keluarga (KK) yang ada yaitu 1.493 kk. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana penetapan terhadap kriteria masyarakat desa hutan yang dapat mengakses program PHBM tersebut. Disebutkan oleh Khususiyah 2013, kriteria masyarakat yang bisa mengakses PHBM adalah masyarakat miskin, masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan janda. Namun kenyataannya yang terjadi adalah banyaknya pengalih hak guna lahan dari masyarakat kriteria sesuai ke masyarakat yang tidak sesuai (kaya, mampu).

Perum Perhutani memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kelestarian Hutan Jawa. Bentuk/kriteria dari kelestarian hutan ini harus dan sudah dipahami oleh seluruh anggota Perum Perhutani, terutama bagi satuan kerja yang terjun langsung di lapang seperti mandor dan mantri hutan. Dalam program PKPH terkadang terjadi selisih paham antara mandor ataupun mantri hutan sebagai pihak Perum Perhutani dengan petani hutan mitra. Selisih paham biasanya disebabkan oleh himbuan yang diberikan mandor/mantri kepada petani hutan mitra agar lebih memperhatikan aspek kelestarian dalam berusahatani. Menurut mandor Perum Perhutani diawal perijinan pemakaian lahan, petani sudah diberikan mengenai peraturan yang harus dijaga dan dipatuhi. Namun tetap saja terdapat petani yang melanggar sehingga tujuan kelestarian cukup terganggu.

Selain tujuan menjaga kelestarian hutan program PKPH juga memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Tidak bisa dipungkiri memang dengan adanya PKPH telah memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan utamanya pada peningkatan pendapatan petani hutan. Pendapatan tersebut dapat diperoleh petani melalui kegiatan produksi pertanian/usahatani di lahan “Tetelan” dan melalui penyadap getah pinus. Besaran tingkat pendapatan petani mitra program PKPH tersebut dipengaruhi oleh jenis keikutsertaan kegiatan kemitraan yang mereka ikuti. Tingkat pendapatan petani mitra dengan dampak kelestarian hutan harus berjalan secara bersamaan sebagai tujuan dari program PKPH yang dilakukan.

Dari uraian di atas tentang pola kemitraan dalam program PKPH di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pola Kemitraan dan aksesibilitas petani desa hutan dalam kemitraan bagi hasil pada program PKPH di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
2. Bagaimana tingkat kesesuaian penerapan program PKPH berdasarkan kelestarian hutan oleh petani masyarakat desa hutan di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat pendapatan dari sistem kemitraan Penggarap lahan ‘Tetelan’ dengan sistem kemitraan Penyadap Getah Pinus dalam program PKPH di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pola kemitraan dan aksesibilitas petani desa hutan dalam kemitraan bagi hasil pada program PKPH di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Menganalisis tingkat kesesuaian penerapan program PKPH berdasarkan kelestarian hutan oleh petani masyarakat desa hutan di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
3. Menganalisis perbedaan tingkat pendapatan dari sistem kemitraan Penggarap lahan ‘Tetelan’ dengan sistem kemitraan Penyadap Getah

Pinus dalam program PKPH di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna bagi pembaca dan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan program PKPH atau PHBM. Adapun secara detail kegunaan penelitian ini sebagai:

1. Bahan informasi mengenai program penerapan PKPH atau PHBM di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Bahan yang dapat menjadi acuan pemerintah atau *stakeholder* dalam penerapan kebijakan selanjutnya
3. Sumbangan pemikiran dalam kajian ilmu penelitian sosial pada Fakultas Pertanian Khususnya Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian.
4. Bahan informasi bagi mahasiswa dan peneliti yang akan meneliti masalah yang sama.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Theresia (2008) tentang Efektivitas PHBM di KPH Kuningan dan Majalengka, penentuan efektivitas dari program dilihat dari seberapa besar tujuan dari program bisa tercapai. Berdasarkan pemamparan penulis tujuan yang tercapai adalah peningkatan pendapatan masyarakat serta secara bersama-sama tercipta hutan yang lestari. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai motivasi awal masyarakat ikut serta dalam program adalah karena kebutuhan lahan garapan untuk mengerjakan usaha pertanian. Kolaborasi antara perum perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sudah baik. Indikator yang menunjukkannya adalah perhitungan skor dari (faktor pembagian tugas, faktor kepercayaan faktor pembagian peran dan tanggung jawab, faktor kapasitas faktor hasil program dan faktor pentingnya resiko) telah menunjukkan hasil yang cukup baik dan masih tetap memerlukan upaya untuk lebih membangun. Partisipasi LMDH terhadap tahap perencanaan dan evaluasi PHBM tergolong dalam kategori sedang, sedangkan pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil menunjukkan berada dalam kategori tinggi.

Artikel selanjutnya oleh Ansori, dkk (2009) dengan topik Pengelolaan Hutan Kemitraan untuk Menyejahterakan Rakyat (kasus PHBM di Parung Panjang). Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa persepsi masyarakat terhadap PHBM bersifat positif karena dapat meningkatkan penghasilan. Persepsi terhadap kondisi biofisik menganggap hutan menjadi lebih baik dan aman. Terdapat ketidaksetaraan masyarakat dengan perhutani, kemitraan cenderung bersifat asimetris. Pihak Perhutani masih mendominasi karena merasa paling berhak dan bertanggung jawab dalam mengelola hutan di wilayahnya. Program pemberdayaan belum dapat direalisasikan tujuannya karena masih bias, misi dari program pemberdayaan mengamankan hutan dan meredam konflik.

Studi kasus mengenai partisipasi masyarakat dalam PHBM di Kecamatan Karanggayam Kebumen oleh Anomsari pada 2015 menunjukkan hasil bahwasanya penilaian terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan program kerja PHBM masih sangat minim karena mayoritas perencanaannya telah ditentukan oleh Perhutani. Dijelaskan juga bahwa masyarakat Karanggayam

bersedia dan telah mendapat manfaat dari kerjasama dengan Perhutani yang berkaitan dengan pemanenan getah pinus dan sewa lahan perhutani. Manfaat yang ada telah sama-sama dirasakan juga oleh masyarakat dan perum perhutani. Manfaat tersebut adalah adanya peningkatan pendapatan dan peningkatan keamanan hutan.

Hasil penelitian oleh Achirrudin (2011) tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung dalam Rangka Pelestarian Hutan Lindung di Gunung Sumbing, menyebutkan bahwa kesadaran masyarakat masih sangat kurang akan manfaat PHBM sehingga banyak terjadi pelanggaran oleh masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi juga memberikan dampak negatif terhadap Perum Perhutani yang berupa cara pandang buruk dari pihak luar mengenai pengelolaan Perum Perhutani. Selain itu hasil upaya penyelesaian yang telah dilaksanakan atas pelanggaran yang terjadi juga dapat menjaga status tanah dan kelestarian hutan kembali.

Penelitian oleh Zain dkk tahun 2013 ini membahas kemitraan PHBM di Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kemitraan yang terjalin oleh KPH dan LMDH desa Jungglunharjo kurang berjalan dengan semestinya. Dalam penelitian ini juga membahas faktor yang dapat mendukung kerjasama yaitu: LMDH yang berbadan hukum dan Pembangunan Koperasi milik LMDH. Dimasukkan juga faktor yang menjadi penghambat jalannya kemitraan adalah kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam beberapa kegiatan pengelolaan hutan, masih adanya pencurian kayu serta infrastruktur yang kurang memadai untuk akses ke hutan.

Sedangkan oleh Khususiyah (2013) menjelaskan hasil dari penelitiannya tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di DAS Konto Malang, Pembelajaran Keberhasilan dan Kegagalan Program bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program PHBM adalah ketaatan untuk tidak melakukan alih hak guna lahan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat, penyuluhan dan tingkat kepercayaan masyarakat. Fokus pada alih hak guna lahan di dalam penelitian ini disebutkan kriteria masyarakat yang bisa mengakses

PHBM adalah masyarakat miskin, masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan janda, namun kenyataannya yang terjadi adalah banyaknya pengalih hak guna lahan dari masyarakat kriteria sesuai ke masyarakat yang lebih kaya.

Kusdamayanti pada tahun 2008 menulis catatan bagaimana kesepakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Malang dengan Perum Perhutani mengenai program PKPH yang kurang melibatkan masyarakat. Dalam catatan ini diungkap bahwa program ini berawal dari PHBM oleh Perum Perhutani pada tahun 2001 kemudian mendapat penolakan Pemerintah Daerah. Hingga terjadi perdebatan dan penyesuaian antar berbagai pihak termasuk Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan masyarakat desa hutan. Tepatnya pada tahun 2004 terjadi kesepakatan adanya perubahan PHBM menjadi PKPH. Dalam kesepakatan ini berdasarkan penulis keterlibatan MDH sangat sedikit, padahal dalam salah satu penyebab penolakan pemda ditunjukkan kepada MDH. Dalam penelitian ini dominasi pemerintah sangat terlihat dalam penyusunan kebijakan PKPH.

## **2.2. Kebijakan Pengelolaan Hutan**

### **2.2.1. Definisi dan Jenis Hutan**

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967, makna hutan adalah suatu lapangan tumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, arti hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Menurut Achirrudin (2011) hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pohon-pohon serta tumbuhan lainnya. Kawasan ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi paling penting. Hutan terdapat di seluruh belahan bumi baik di daerah iklim tropis maupun di daerah iklim dingin, di pegunungan maupun di dataran rendah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, terdapat 3 jenis hutan, yaitu:

1. Jenis hutan menurut pemilikinya, yaitu:
  - a. Hutan negara, merupakan kawasan hutan alam yang tumbuh di atas tanah negara bukan hak milik. Selain pengertian tersebut, yang juga merupakan hutan negara adalah hutan alam atau hutan buatan di atas tanah yang diberikan kepada Daerah Tingkat II, dan diberikan dengan hak pakai atau hak pengelolaan.
  - b. Hutan milik, adalah hutan yang tumbuh di atas tanah hak milik. Hutan jenis ini disebut hutan rakyat. Yang dapat memiliki dan menguasai hutan milik, adalah orang dan atau badan hukum.
2. Jenis hutan menurut fungsinya, yaitu:
  - a. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang sifat alamnya digunakan untuk :
    - 1) mengatur air, 2) Mencegah banjir dan erosi, 3) memelihara kesuburan tanah.
  - b. Hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang digunakan untuk memproduksi hasil hutan, yang dapat memenuhi: 1) keperluan masyarakat pada umumnya, 2) pembangunan industri, dan 3) keperluan ekspor.
  - c. Hutan suaka alam, merupakan kawasan hutan yang keadaan alamnya sedemikian rupa, sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdapat dua jenis hutan suaka alam yaitu suaka alam yang khas dan suaka margasatwa khas.
  - d. Hutan wisata, yaitu kawasan hutan yang diperuntukkan khusus dan dibina dan dipelihara bagi kepentingan pariwisata. Hutan ini juga masih dikelompokkan menjadi dua yaitu hutan taman wisata rekreasi budaya dan hutan taman buru untuk kegiatan pemburuan.
3. Jenis hutan menurut peruntukannya, yaitu:
  - a. Hutan tetap, yaitu hutan baik yang sudah ada, yang akan ditanami maupun yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan.
  - b. Hutan cadangan, yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan yang diperuntukannya belum ditetapkan, dan bukan hak milik. Apabila diperlukan hutan cadangan ini dapat dijadikan hutan tetap.

- c. Hutan lainnya, yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan tetap dan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah hak milik atau tanah yang dibebani hak lainnya.

### 2.2.2. Kondisi dan Sejarah Pengelolaan Hutan Indonesia

Keberadaan sumber daya hutan di Indonesia meliputi kawasan seluas 120 juta ha, hampir 70% dari luas wilayah daratannya. Menurut Salim (2003) hutan di Indonesia merupakan sumber daya yang sangat bernilai, tidak hanya untuk lingkungan hidup, tetapi juga dari sudut pandang negara berkembang, untuk pembangunan ekonomi dan politik. Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan alam Indonesia dimulai tahun 1967 yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 tahun 1967. Setelah adanya kebijakan tersebut Indonesia pada rentang waktu 1980an hingga pertengahan 1990an banyak dampak positif yang didapat oleh negara. Menurut Aryadi (2012) pendapatan dan devisa negara mengalami peningkatan, infrastruktur berkembang dan pendapatan masyarakat meningkat berkali-kali lipat. Pada 1993 nilai ekspor hasil hutan Indonesia mencapai 26,9% dari seluruh ekspor non minyak. Hingga pada periode 1994-1997 industri hutan telah menyumbang rata-rata 7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun eksploitasi hutan besar-besaran tersebut telah memberikan dampak negatif berupa degradasi hutan dan lahan beserta fungsi yang menyertainya. Setidaknya 59 juta ha dari total luas hutan mengalami kerusakan (Sumadiya, 2005 dalam Aryadi, 2012). Kerusakan hutan ini menurut Barber (1989) dalam Nurjaya (2005) menimbulkan tiga dampak negatif: a) degradasi sumber daya alam hayati dan perubahan pola iklim, b) degradasi sumber daya hutan secara ekonomi c) menimbulkan erosi tanah dan merusak tata air yang dapat mengancam pembangunan pertanian.

Proses degradasi sumber daya hutan dan lahan telah terbukti dapat menimbulkan dampak yang cukup luas, yang mencakup aspek biofisik lingkungan, ekonomi, sosial budaya dan sosial politik. Menurut Awang, dkk (2002) orientasi pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia yang selama ini didominasi oleh timber management oriented telah memacu kerusakan dan meninggalkan kepentingan dan partisipasi masyarakat sekitar hutan. Pengelolaan

sumbera daya hutan pada dasarnya bukan semata persoalan teknis kehutanan (tanah, pohon, air, kayu maupun non kayu) namun lebih menjadi persoalan sosial yang berpangkal dari pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Perum Perhutani adalah perusahaan BUMN yang disertai tugas untuk mengelola hutan di Jawa dan Madura sejak tahun 1972. Dengan demikian Perum Perhutani mempunyai tugas ganda yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Sebagai badan usaha, Perhutani harus mengejar pendapatan dan memperoleh keuntungan yang besar untuk kelancaran pembangunan nasional. Akan tetapi sebagai badan usaha milik negara harus tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat dalam setiap tindakanya. Kepentingan kehutanan dan kepentingan masyarakat harus menjadi satu kesatuan.

Sebenarnya langkah Perum Perhutani memformulasikan programnya menjadi program pendekatan kesejahteraan masyarakat dan pembinaan desa hutan (PMDH) sejak 1973. Tahun 1986 dikembangkan konsep perhutanan sosial dan pada 1991 dikembangkan bentuk lain sistem kehutanan sosial berupa pengelolaan hutan model Management Regime (MR). Namun tetap saja ditunjukkan pada pemaparan di atas bahwa kerusakan tetap terjadi hingga awal era reformasi.

Melihat kondisi tersebut Perum perhutani kemudian meluncurkan program baru yaitu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya. Hal ini berdasarkan SK Direktur Utama Perhutani No. 136/Dir/2001. Menurut SK tersebut yang dimaksud dengan PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai berkelanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

### **2.3. Kemitraan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat**

#### **2.3.1. Dasar Hukum PHBM**

Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat yang kemudian di singkat PHBM menurut Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan

yang dilakukan dengan jiwa berbagi antara Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak lain yang berkepentingan, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Dengan demikian program PHBM merupakan suatu proyek Perum Perhutani yang dipandang dapat menyelamatkan hutan. Program PHBM adalah pengelolaan sumber daya hutan dengan cara berbagi, yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan waktu, ruang dan lahan, dan hasil dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung.

PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. Selain itu secara rinci tujuan program PHBM adalah untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Meningkatkan peran serta tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan lain terhadap pengelolaan sumber daya hutan.
3. Meningkatkan mutu sumber daya hutan, produktivitas dan keamanan hutan.
4. Mendorong dan menyelaraskan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
5. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara.

### **2.3.2. Definisi Kemitraan**

Menurut Sulistiyani (2004) Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berakar dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan sebagai pasangan, jodoh, sekutu, sedangkan *partnership* diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian. Disini kemitraan dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau dengan tujuan tertentu.

Definisi Pola kemitraan atau *contract farming* dari Bachriadi (1995) adalah sebagai salah satu bentuk pengorganisasian produksi dalam agroindustri yang

membuat petani-petani kecil terlibat dan terintegrasi secara vertikal ke atas di tengah pasar global melalui firma-firma swasta atau lembaga publik, meskipun petani tersebut tidak bermain secara langsung. Dengan cara ini diharapkan petani-petani tersebut yang memiliki keterbatasan dapat memetik nilai tambah karena terlibat dalam permainan yaitu aktivitas perdagangan pasar global dan kompetisi pasar yang lebih luas ketimbang pasar lokal tradisional.

Sutawi (2002) menyebutkan bahwa kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama usaha kecil dengan usaha besar atau menengah yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar dan memepertimbangkan prinsip-prinsip dari kemitraan, yaitu memperkuat, saling menguatkan, dan saling menguntungkan. Kemitraan sesungguhnya merupakan sebuah kebutuhan bagi para pihak dengan kesamaan orientasi yang ingin menghemat energi dan menghasilkan manfaat yang berlipat ganda. Hafsa (1999) menabahkan kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada kesetaraan posisi tawar melalui terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan ketrampilan yang didasari rasa percaya antar mitra dan kelompok melalui sinergi kemitraan.

Kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena kemitraan bukanlah proses *merger* atau akuisisi. Kemitraan usaha yang kita inginkan bukanlah kemitraan yang bebas nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Adapun prinsip dasar kemitraan menurut UU No. 20 (2008) adalah sebagai berikut:

1. Saling Memerlukan
2. Saling Mempercayai
3. Saling Memperkuat
4. Saling Menguntungkan

Selain definisi kemitraan usaha yang telah dikemukakan pada lembar sebelumnya, masih banyak lagi definisi kemitraan usaha lain yang diterangkan oleh para ahli. Umumnya para ahli mendefinisikanya berdasarkan latar belakang ilmu masing-masing. Namun dalam penelitian ini yang dimaksudkan sebagai

kemitraan adalah yang sesuai dengan konsep program PHBM. Disini kemitraan PHBM adalah kerjasama antara masyarakat desa hutan dengan Perum Perhutani dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses dengan prinsip kesetaraan dan dan saling menguntungkan.

### 2.3.3. Model-model Kemitraan

Terdapat banyak sekali model kemitraan petani yang dibedakan berdasarkan jenisnya. Diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah, menjadi :

a. Inti Plasma

Dalam pola kemitraan inti plasma ini usaha besar memiliki peran sebagai inti yaitu untuk membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah yang menjadi plasmanya. Adapun peran dari usaha besar adalah menyediakan dan menyiapkan lahan; menyediakan sarana produksi; memberikan bimbingan teknis dan manajemen usaha; memberi informasi serta; memberi bantuan lain yang terkait dengan upaya pencapaian efisiensi, produktivitas dan wawasan usaha.

b. Subkontrak

Pada Kemitraan jenis Subkontrak dukungan yang diberikan oleh usaha besar adalah : kesempatan usaha kecil mengerjakan sebagian produksi maupun komponennya; kesempatan usaha kecil memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan; memberi bimbingan dan kemampuan teknis usaha; perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi; upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

c. Waralaba

Dalam kemitraan waralaba, pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan atau berdasarkan perjanjian waralaba. Selain itu pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan keada penerima waralaba secara berkesinambungan.

d. Perdagangan Umum

Perdagangan umum dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan, loksi usaha atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil, menengah oleh usaha besar secara terbuka. Pegaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan satu pihak.

e. Distribusi dan Keagenan

Kemitraan distribusi dan keagenan adalah usaha menengah dan atau usaha besar memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan atau usaha kecil.

2. Berdasarkan jenis mitra transaksinya, pola kemitraan dapat dibagi menjadi:

a. Pola Kemitraan dengan Perusahaan Pembimbing Pengelola (PKP3)

Pola hubungan kemitraan ini merupakan antara perusahaan pembimbing yang berfungsi memberikan bimbingan teknologi, usaha tani, bantuan sarana produksi, kredit dan pemasaran hasil produksi pada petani binaanya melalui petani atau gabungan kelompok tani. Dalam melaksanakan bimbingan tersebut, perusahaan pembimbing akan melakukan kerjasama dengan mitra media yang akan berhubungan langsung dengan kelompok tani. PKP3 pada dasarnya menyediakan modal kerja untuk pengelolaan usahatani bagi petani yang bersumber dari mitra usaha. Upaya untuk meringankan beban petani dilakukan dengan memberikan Kredit Usahatani (KUT), agar petani mempunyai modal untuk melakukan dan memperbaiki proses produksi usaha taninya.

b. Pola Kemitraan dengan Perusahaan Pembimbing Penghela (PKP2H)

Pola kemitraan ini adalah perusahaan memberi bimbingan teknologi, pengelolaan usaha tani, dan pemasaran hasil kepada kelompok tani. Bantuan sarana produksi dan kredit diperoleh petani dari pihak lain atau swasta. Pihak mitra usaha tetap menggunakan mitra media dalam membimbing masalah teknologi dan pemasarannya yang berhubungan langsung dengan kelompok tani.

c. Pola Kemitraan Model Perusahaan Inti Rakyat (PIR)

Kemitraan ini merupakan kerjasama antara petani sebagai plsama dan perusahaan menjadi intinya. Kemitraan ini bergerak di bidang usahatani sampai pemasaran hasil pertanian. Kemitraan ini bersifat saling menguntungkan dalam

jangka waktu panjang dan berkesinambungan. Pihak perusahaan melaksanakan fungsi bimbingan, pengelolaan, pelayanan sarana produksi pertanian, kredit, dan pemasaran hasil, di samping perusahaan juga melaksanakan usaha sendiri. Perusahaan inti adalah perusahaan yang dianggap mampu memenuhi syarat sebagai pembimbing bagi petani sebagai plasma yaitu mempunyai modal besar, menguasai teknologi, dan menguasai pasar. Hubungan antara perusahaan dengan plasmanya ini diikat dalam perjanjian kerjasama yang memuat kewajiban dan hak dari masing-masing pihak yang telah disepakati bersama.

d. Pola Kemitraan dengan Perusahaan Sistem Yarnen (PKY)

Pola kemitraan jenis ini dilakukan oleh petani bersama mitranya yaitu perusahaan, BUMN, koperasi atau pihak lainnya. Pola kemitraan ini sangat sederhana, perusahaan memiliki debutor petani dengan memberikan pinjaman modal kerja. Pemberian pinjaman ini diharapkan dapat meningkatkan produksi petani sehingga nantinya dapat mengembalikan pinjaman dengan atau tanpa bunga.

3. Berdasarkan jangka waktunya pola kemitraan dibedakan menjadi:

a. Kemitraan Insidental

Kemitraan Insidental adalah bentuk kemitraan yang didasari atas kepentingan ekonomi bersama dalam jangka pendek dan dihentikan kalau kegiatan yang bersangkutan telah selesai.

b. Kemitraan Jangka Menengah

Kemitraan jangka menengah adalah bentuk kemitraan berdasarkan motif ekonomi jangka menengah atau musim produksi tanaman. Kemitraan jenis ini dapat dilakukan dengan tanpa perjanjian tertulis.

c. Kemitraan Jangka Panjang dan Terus Menerus

Kemitraan jenis ini dilakukan dalam jangka waktu panjang dan terus menerus dalam skala besar dengan perjanjian tertulis. Kemitraan ini didasari saling ketergantungan dalam pengadaan lahan, bahan baku, permodalan, dll.

4. Berdasarkan sifat atau pendapat yang bersifat sporadik, pola kemitraan dapat dibagi menjadi:

a. *Pseudo Partnership*/Kemitraan Semu

Kemitraan ini merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan ada satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Sesuatu yang unik di sini ialah bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa perlu untuk bekerjasama, namun pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan apa manfaatnya.

b. *Mutualism Partnership*/Kemitraan Mutualistik

Kemitraan ini ialah persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan dan mendapatkan manfaat lebih sehingga akan tercapai tujuan secara lebih optimal.

c. *Conjugation Partnership*/Kemitraan Konjugasi

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dilakukan untuk memperoleh tujuan bersama, dan ketika tujuan terpenuhi maka pihak-pihak yang bermitra akan terpisah. Tujuan dari pihak-pihak mitra ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masing-masing.

#### 2.3.4. Tujuan dan Manfaat Kemitraan

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan yaitu untuk membantu para pelaku dan pihak yang bermitra yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan bertanggung jawab. Menurut Hafsah (1999) tujuan ideal kemitraan adalah :

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usah kecil
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional
5. Memperluas kesempatan kerja
6. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

Sedangkan manfaat yang dapat dicapai dari adanya kemitraan usaha adalah (Hafsah, 1999):

#### 1. Produktivitas

Bagi perusahaan besar, dengan model kemitraan perusahaan besar dapat memaksimalkan kapasitas produksi dengan ketersediaan input misalkan tenaga kerja atau input lainnya. Sedangkan untuk kelompok kecil akan mendapat akses modal baru dari kemitraan sehingga dapat meningkatkan produksinya.

#### 2. Efisiensi

Dengan adanya kemitraan masing-masing pihak mitra akan saling diuntungkan dalam mengefisienkan produksinya. Dengan adanya kemitraan para pihak mitra dapat menghemat input produksi tanpa menurunkan kapasitas produksi.

#### 3. Jaminan Kualitas Kuantitas dan Kontinuitas

Dengan adanya kemitraan akan mempermudah kontrol produk karena adanya kesepakatan yang jelas dalam sebuah kemitraan. Akan terdapat kontrak atau kesepakatan mengenai penentuan harga atau nilai lain ketika produk telah sesuai atau tidak.

#### 4. Risiko

Hubungan kemitraan memang idealnya untuk mengurangi risiko yang dihadapi kedua pihak mitra. Utamanya risiko kerusakan hutan.

#### 5. Sosial

Kemitraan dapat memberikan dampak sosial yang cukup tinggi. Ini berarti negara terhindar dari kecemburuan sosial. Kemitraan dapat pula menghasilkan persudaraan antar pelaku ekonomi yang berbeda status.

#### 6. Ketahanan Ekonomi Nasional

Di dalam kemitraan ada unsur pemberdayaan bagi pihak yang lemah. Dengan adanya kemitraan bisa memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan yang kemudian diikuti tingkat kesejahteraan dan pemerataan yang lebih baik.

### **2.3.5. Jiwa dan Prinsip Kemitraan PHBM**

Mengacu pada Pedoman PHBM yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani pada tahun 2009 sesuai dengan BAB II Pasal 2 jiwa PHBM adalah kesediaan Perusahaan, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan (stakeholder)

untuk berbagi dalam pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat sesuai kaidah sebagai berikut:

- 1) Keseimbangan : ekologi, sosial dan ekonomi
- 2) Kesesuaian : kultur dan budaya setempat
- 3) Keselarasan : pembangunan wilayah/daerah
- 4) Keberlanjutan : fungsi dan manfaat sumber daya hutan
- 5) Kestaraan : peran dan resiko

Kaidah di atas merupakan pondasi utama dari pelaksanaan kemitraan PHBM di Indonesia. Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat merupakan kebijakan Perum Perhutani yang menjiwei strategi, struktur dan budaya perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Jadi dalam usaha pencapaian tujuan PHBM, Perum Perhutani menggunakan strategi yang memiliki struktur. Tujuannya dari itu tidak lain untuk memudahkan mengintegrasikan perencanaan dengan pelaksanaannya. Selain itu prinsip dasar pelaksanaan PHBM adalah:

- 1) Prinsip keadilan dan demokratis
- 2) Prinsip keterbukaan dan kebersamaan
- 3) Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami
- 4) Prinsip kejelasan hak dan kewajiban
- 5) Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan
- 6) Prinsip kerjasama kelembagaan
- 7) Prinsip perencanaan partisipatif
- 8) Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur
- 9) Prinsip perusahaan sebagai fasilitator
- 10) Prinsip kesesuaian pengelolaan dan karakteristik wilayah

### **2.3.6. Ketentuan Kemitraan PHBM**

Berdasarkan Pedoman PHBM (2009) ketentuan kemitraan dalam PHBM adalah secara proporsional, antara “kemitraan sejajar” yang masing-masing pihak mempunyai peran, tanggung jawab dan hak secara proporsional, antara lain :

1. Pihak –pihak yang bekerjasama dalam PHBM :
  - a. Perum Perhutani
  - b. Masyarakat Desa Hutan

- c. Pihak lain yang berkepentingan : pemerintah, LSM, swasta, dan lainnya
2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur sebagai berikut:
  - a. Hak masyarakat desa hutan sebagai berikut:
    - 1) Bersama Perum Perhutani menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi
    - 2) Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan.
    - 3) Memperoleh fasilitas dari Perum Perhutani dan atau pihak lain untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.
  - b. Kewajiban masyarakat desa hutan sebagai berikut :
    - 1) Bersama dengan Perum Perhutani menjaga kelestarian hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
    - 2) Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya.
    - 3) Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalakan fasilitas yang diberikan oleh Perum Perhutani dan pihak lain.
  - c. Hak Perum Perhutani :
    - 1) Bersama masyarakat desa hutan menyusun rencana kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi.
    - 2) Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor yang dikontribusikannya.
    - 3) Memperoleh fasilitas dari Perum Perhutani dan atau pihak lain untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.
  - d. Kewajiban Perum Perhutani sebagai berikut :
    - 1) Bersama dengan Perum Perhutani menjaga kelestarian hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
    - 2) Membrikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan kemampuannya.
    - 3) Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalakan fasilitas yang diberikan oleh Perum Perhutani dan Pihak lain.

#### **2.4. Analisis Pendapatan Usahatani pada Lahan Hutan**

Usahatani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, bangunan

yang didirikan di atas tanah dan sebagainya. Menurut Makeham dan Malcolm (1991) Usahatani adalah cara bagaimana petani mengelola kegiatan-kegiatan pertanian. ukuran dan jenis usahani mungkin berkisar dari sebidang lahan kecil/kurang dari 1 ha sampai perusahaan pertanian negara yang meliputi lahan di beberapa desa.

Sedangkan menurut Soekartawi (1986), usahatani dianggap sebagai suatu organisasi dari sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian. usahatani meliputi organisasi, operasi pembiayaan, dan penjualan sebagai unit atau satuan produksi dalam keseluruhan organisasi. Usahatani memiliki ruang lingkup petani, keluarga petani, dan bagaimana petani mengelola usahatannya. Tujuan usahatani adalah bagaimana petani dapat memperoleh hasil sehingga kehidupan seluruh keluarganya menjadi lebih baik. Hasil tersebut disebut dengan pendapatan usahatani.

Pendapatan usahatani atau keuntungan usahatani dihitung berdasarkan pengurangan antara total penerimaan usahatani dengan total biaya usahatani. Secara matematis dalam mencari pendapatan usahatani dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\Pi = TR - TC$$

Dimana :

$\Pi$  = pendapatan petani (Rp)

TR = total penerimaan (Rp)

TC = total biaya (Rp)

Sedangkan biaya usahatani merupakan seluruh pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan usahatani. Biaya ini dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Biaya tetap dianggap sangat penting apabila petani memikirkan tambahan investasi, seperti alat pertanian, mesin pertanian dan sebagainya. Menurut Soekartawi, (1986) Tiap tambahan investasi hanya dapat dibenarkan jika petani dapat membelinya dan dalam jangka panjang dapat memberikan arus keuntungan.

Menurut Soekartawi (1986) Jenis biaya yang kedua adalah biaya variabel atau biaya yang mengalami perubahan apabila luas usahanya berubah atas pengeluaran yang dikeluarkan pada suatu produksi usahatani. Biaya variabel bersifat proporsional terhadap tingkat intensitas kegiatannya namun juga menentukan hasil per hektar kegiatan tersebut. Diantaranya yang termasuk dalam biaya variabel usahatani adalah biaya pupuk, biaya bibit, biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Total biaya usahatani dapat diperoleh dengan menjumlahkan biaya variabel dengan biaya tetap dalam usahatani. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$TC = FC + VC$$

Dimana :

TC = total biaya (Rp)

FC = biaya tetap (Rp)

VC = biaya variabel (Rp)

Jadi penyusun pendapatan usahatani adalah penerimaan usahatani dan biaya usahatani. Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh petani dengan harga jual (Soekartawi, 1986). Rumus matematis yang dapat digunakan untuk menghitung penerimaan yaitu :

$$TR = P \times Q$$

Dimana :

TR = *total revenue* (total penerimaan) dari usahatani (Rp)

P = *price* (harga) produksi (Rp)

Q = *quantity* (jumlah produksi) dari usahatani (kg)

### III. KERANGKA TEORITIS

#### 3.1. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan hutan adalah segala tindakan dari sekelompok orang atau sekumpulan organisasi terhadap cara-cara memanfaatkan hutan dengan segala isinya. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) atau pada penelitian ini disebut Pola Kemitraan Pengelola Hutan (PKPH) dilaksanakan dengan tujuan untuk pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien dan profesional. Tujuan dari program PKPH adalah tercapainya keberhasilan fungsi dan manfaat sumber daya hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau pihak lain yang berkepentingan dalam usaha pengelolaan sumber daya hutan. Berdasarkan Pedoman PHBM 2009 maksud dan tujuan PHBM adalah adanya keterpaduan aspek ekonomi, sosial dan ekologi dalam pengelolaan hutan. Upaya keterpaduan aspek sosial bisa dilihat dari bagaimana hubungan antar pihak PKPH, kemudian pada aspek ekologi dapat dilihat dari tingkat kelestarian dari pelaksanaan program sedangkan pada aspek ekonomi dapat dilihat dari pendapatan petani hutan.

Program PKPH diwujudkan di dalam sebuah hubungan kemitraan bagi hasil antara Perum Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan. Menurut Puspawati (2004) konsep kemitraan idealnya kedua belah pihak yang bermitra harus saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Perum Perhutani membutuhkan bantuan dalam menjalankan pengelolaan hutan dan masyarakat desa hutan membutuhkan akses untuk mengusahakan usaha di hutan. Disini pengelolaan hutan dilakukan secara bersama-sama, masing-masing dari Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan saling memiliki peran saling mendukung.

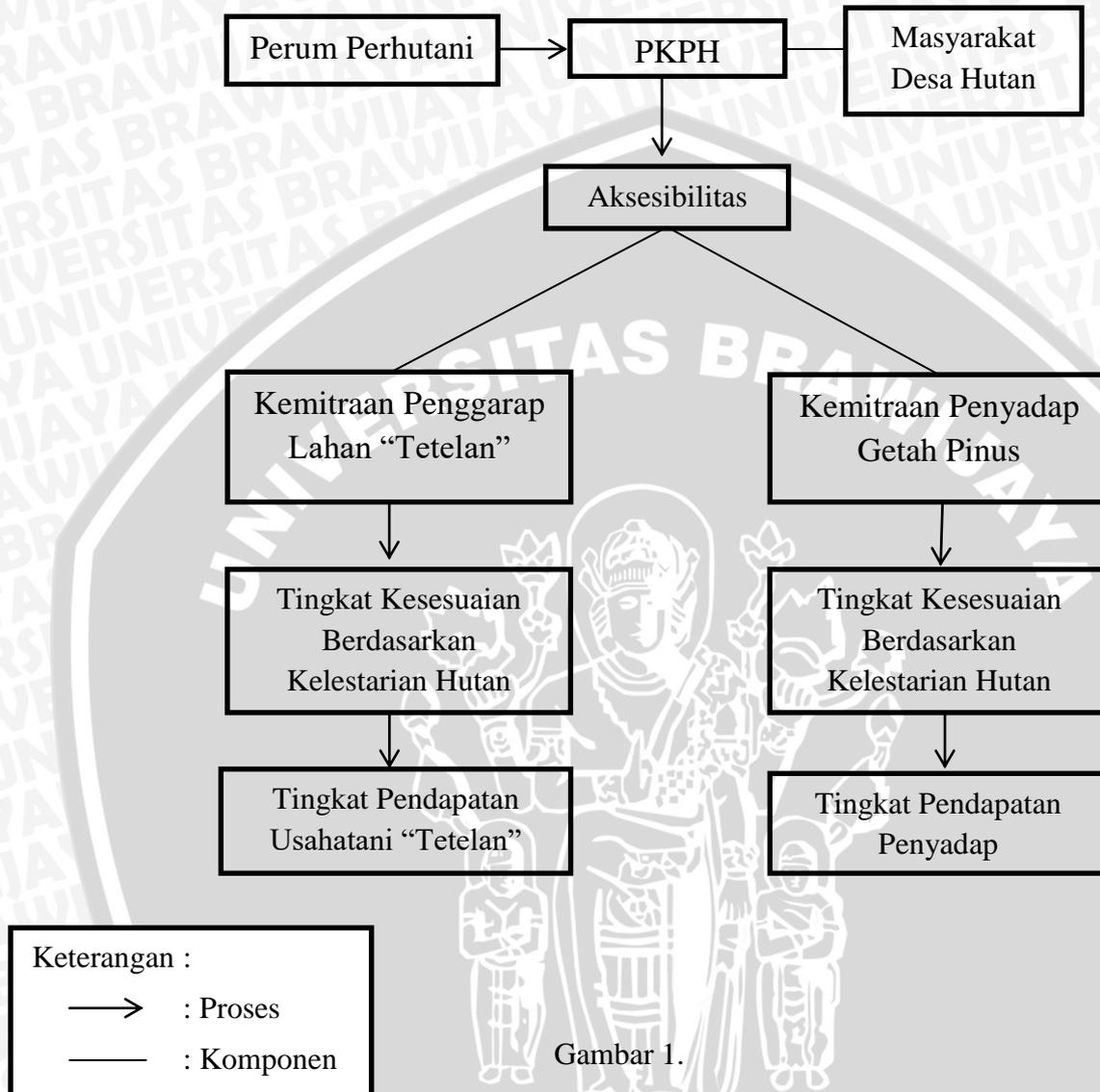
Adanya program PKPH memberikan kesempatan masyarakat desa hutan untuk bisa terlibat secara langsung dalam pengelolaan hutan dan mendapat keuntungan. Luas lahan hutan yang digunakan untuk program PKPH memiliki keterbatasan dan tidak mampu memenuhi total kebutuhan luasan seluruh anggota masyarakat desa hutan. Hal ini membuat tidak semua anggota masyarakat desa hutan dapat mendapat aksesibilitas tersebut. Keterbatasan ini disebabkan adanya perhitungan risiko kelestarian hutan oleh Perum Perhutani, maka dengan kondisi demikian sepatutnya Perum Perhutani memprioritaskan untuk memilih anggota

yang memang membutuhkan secara materi agar tujuan peningkatan kesejahteraan bisa benar-benar didapat oleh masyarakat desa hutan yang saat ini kurang mampu.

Masing-masing jenis kemitraan yang ada di Desa Kucur yaitu kemitraan penyadap getah pinus dan kemitraan penggarap lahan “Tetelan” memiliki aturan pelaksanaan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama. Sesuai dengan UU No .20 (2000) yang menjadi prinsip pokok kemitraan antara lain adalah tujuan yang sama, saling memberi kontribusi, adanya efek sinergi dan dapat memberikan keuntungan diantara pihak mitra. Baik Perum Perhutani maupun masyarakat desa hutan harus menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak yang sesuai. Pada kondisi ini tidak jarang salah satu pihak lalai terhadap kesepakatan dan tanggung jawabnya sehingga mengabaikan tujuan bersama kemitraan. Theresia (2008) mengungkapkan keberhasilan program PKPH ini dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan program bisa tercapai. Isu kelestarian merupakan salah satu tujuan utama kemitraan ini. Menurut Khususiyah (2013) untuk dapat melihat kelestarian hutan dapat dilihat dari seberapa jauh pedoman program dapat ditaati oleh pihak mitra khususnya petani mitra masyarakat desa hutan.

Program PKPH selain bertujuan untuk aspek ekonomi makro dan pengelolaan lingkungan yang lestari juga memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat desa hutan salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatan usahatani di dalam kemitraan bagi hasil program PKPH. Pemberian aksesibilitas sama artinya dengan pemberian input produksi usahatani yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan dengan mengusahakan kegiatan pertanian (usahatani) baik dalam kemitraan penggarap lahan “Tetelan” maupun kemitraan penyadap getah pinus. Ukuran besar kecil dari tingkat pendapatan usahatani dalam kemitraan bagi hasil PKPH bergantung pada jenis kemitraan yang masyarakat desa hutan ikuti serta akan dapat mempengaruhi persepsi petani terhadap masing-masing kemitraan tersebut.

Secara matriks alur pemikiran dari penelitian ini bisa dilihat dari gambar di bawah ini :



Gambar 1.  
Skema Alur Pikir Penelitian

### 3.2. Batasan Masalah

Masalah-masalah yang yang diteliti pada penelitian ini dibatasi pada :

1. Program PKPH di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang pada tahun 2016. PKPH adalah program Pola Kemitraan Pengelola Hutan yang mana merupakan bentuk penyesuaian baru dari program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang khusus dilaksanakan di Kabupaten Malang.

2. Tingkat kesesuaian implementasi program didasarkan pada aspek ekologi atau kelestarian hutan yang mengacu pada pedoman program PKPH.
3. Kemitraan Penyadap adalah kemitraan yang dilakukan oleh petani penyadap masyarakat desa hutan dengan Perum Perhutani melalui bagi hasil hasil sadapan getah pinus di hutan oleh petani
4. Kemitraan Penggarap Lahan “Tetelan” adalah kemitraan antara petani penggarap lahan “Tetelan” masyarakat desa hutan dengan Perum Perhutani melalui sistem agroforestri.
5. Pendapatan usahatani penggarap lahan “Tetelan” dalam PKPH merupakan analisis pendapatan usahatani dengan mengambil data musim usahatani terakhir yaitu di tahun 2015/2016. Serta tanpa memasukan pendapatan dari pohon (tegakan) dalam lahan “Tetelan”.

### 3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Aksesibilitas petani desa hutan adalah peluang bagi petani masyarakat desa hutan untuk memperoleh kesempatan ikut mengelola hutan melalui kemitraan penggarap lahan “Tetelan” dan kemitraan penyadap getah pinus.
2. Tingkat Kesesuaian Penerapan Program adalah seberapa jauh peraturan dalam program PKPH dilaksanakan oleh petani mitra. Adapun indikator pengukuran ini menggunakan metode skoring. Adapun kriteria pengukuran sebagai berikut:

No.	Indikator	Pengukuran Indikator	Skor
1	Jumlah pohon pinus yang hidup	a. Kurang (pinus usia 11-15 tahun: kurang dari 500 pohon tiap ha; pinus usia 16-20 tahun: kurang dari 250 pohon/ha)	1
		b. Sedang (pinus usia 11-15 tahun: 500-600 pohon tiap ha; pinus usia 16-20 tahun: 250-300 pohon/ha)	2
		c. Tinggi (pinus usia 11-15 tahun: 662 pohon tiap ha; pinus usia 16-20 tahun: 333/ha)	3
2	Kondisi Tanaman Pinus	a. Tidak baik (perempesan yang tinggi atau >40% )	1
		b. Kurang Baik (dirempes sebagian <40%)	2
		c. Baik (tidak dirempes)	3
3	Jenis tanaman pertanian di bawah	a. Jenis tanaman hortikultura	1
		b. Empon-empon	2

	pohon pinus saat ini	c. Kopi	3
4	Jarak tanaman pertanian dengan pohon pinus	a. Tidak sesuai (< 0,5 m) b. Kurang sesuai (< 1 m dan > 0,5 m) c. Sesuai (> 1 m)	1 2 3
5	Intensitas Penyiangan	a. Tidak sesuai (lebih dari 1x dalam 1 bulan) b. Kurang sesuai (1 bulan sekali) c. Sesuai anjuran (tidak di siang)	1 2 3
6	Kegiatan pengolahan tanah untuk tanaman dibawah pohon pinus	a. Tidak sesuai (lebih dari 2x pengolahan tanah dalam 1 tahun) b. Kurang sesuai (2x pengolahan tanah dalam 1 tahun) c. Sesuai anjuran (1x pengolahan tanah dalam 1 tahun)	1 2 3
7	Kegiatan pemberian pupuk untuk tanaman dibawah pohon pinus	a. Tidak sesuai (pemberian pupuk 4x atau lebih dalam 1 bulan) b. Kurang sesuai (pemberian pupuk antara 2-3 kali dalam 1 bulan) c. Sesuai anjuran (pemberian pupuk 1 bulan sekali)	1 2 3
8	Kesediaan mengganti jenis komoditas dari hortikultur ke Kopi	a. Tidak/belum b. – c. Besedia	1 3
	Total Skor		24

Keterangan skor :

A. Indikator secara Individu

- (Nilai rata-rata skor yang dicapai/nilai maksimal \*100%) < (lebih kecil dari) 50% menunjukkan rendah
- (Nilai rata-rata skor yang dicapai/nilai maksimal \*100%) > (lebih besar dari) 50% dan < (lebih kecil dari) 75% - menunjukkan rendah
- (Nilai rata-rata skor yang dicapai/nilai maksimal \*100%) > (lebih besar dari) 75% menunjukkan tinggi

B. Indikator secara Keseluruhan

- 8 - 13,33 Termasuk Rendah
- 13,34 - 18,66 Termasuk Sedang
- 18,67 - 24 Termasuk Tinggi

3. Pendapatan Usahatani adalah selisih total penerimaan usahatani dengan total biaya usahatani. (Rp)
  - 1) Total Biaya Usahatani adalah penjumlahan dari biaya tetap usahatani dengan biaya variabel usahatani.(Rp)
    - a) Biaya Tetap Usahatani adalah biaya dalam usahatani yang mana jumlahnya perubahannya tidak akan mempengaruhi jumlah produksi usahatani yang di dapat. Dalam penelitian ini biaya tetap adalah biaya sukarela bagi petani penggarap lahan untuk kas Perum Perhutani. Sedangkan biaya tetap untuk petani penyadap dianggap 0. (Rp)
    - b) Biaya Variabel Usahatani adalah biaya dalam usahatani yang mana jumlahnya perubahannya akan mempengaruhi jumlah produksi usahatani yang di dapat. Dalam penelitian ini yang termasuk biaya variabel petani penggarap “Tetelan” adalah biaya bibit, biaya pupuk, biaya pestisida dan biaya tenaga kerja. Sedangkan untuk petani penyadap adalah biaya tenaga kerja yang dihitung berdasarkan HOK pekerja di daerah tersebut.(Rp)
  - 2) Penerimaan Usahatani adalah hasil dari perkalian antara satuan hasil produksi usahatani dengan harga jual tiap satuan hasil produksi usahatani. (Rp).



## IV. METODE PENELITIAN

### 4.1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui tujuan pertama dan kedua dari penelitian, yaitu tentang pengelolaan PKPH oleh Perum Perhutani bersama masyarakat desa hutan serta mengetahui bagaimana cara yang digunakan Perum Perhutani dalam memberikan aksesibilitas kepada masyarakat desa hutan sebagai tujuan pertama. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk menjawab tingkat kesesuaian penerapan program utamanya dalam menjaga kelestarian hutan. Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjawab tujuan penelitian ketiga yang menganalisis pendapatan usahatani petani penggarap lahan “Tetelan” dan penyadap getah. Desain penelitian yang digunakan yakni Studi Kasus (*case study*). Penggunaan metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran rinci tentang pelaksanaan PKPH oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan.

### 4.2. Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* yaitu di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Lebih tepatnya dilaksanakan di 4 Dusun yang ada yaitu di : Dusun Sumberbendo, Dusun Krajan, Dusun Godehan dan Dusun Ketohan. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa keempat dusun yang ada di Desa Kucur merupakan daerah Desa Hutan yang berkarakter pertanian dan sebagian dari masyarakat mengikuti kemitraan bagi dengan Perum Perhutani dalam program PKPH. Alasan yang lain adalah karena daerah tersebut mudah dijangkau oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei tahun 2016.

### 4.3. Teknik Penentuan Informan dan Sampel

Dalam penelitian ini, penentuan sumber data dilakukan dengan metode *purposive* (sengaja). Metode penentuan sumber data secara sengaja dilakukan untuk menentukan informan dan sampel. Informan dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai tujuan penelitian pertama yaitu tentang pola kemitraan dan aksesibilitas masyarakat desa hutan. Informan.

dalam penelitian ini adalah pihak-pihak utama dalam kemitraan antara lain pihak Perum Perhutani (Mandor, Mantri, Asper, KPH Malang) dan Ketua LKDPH Wonolestari. Sedangkan penentuan sampel responden untuk memperoleh data mengenai kesesuaian implementasi program dan pendapatan petani anggota kemitraan bagi hasil PKPH.

Adapun Tabel 1. dibawah ini tentang jumlah pengambilan sampel responden dengan populasi penelitian.

Tabel 1. Jumlah Sampel dan Populasi Penelitian Berdasarkan Keikutsertaan dalam Kemitraan Bagi Hasil PKPH di Desa Kucur, 2015

No	Jenis Kemitraan	Jumlah Populasi (Orang)	Jumlah Sampel (Orang)
1	Kemitraan Penggarap lahan "Tetelan"	± 150	16
2	Kemitraan Penyadap Getah Pinus	22	14
Total		± 172	30

Sumber: Data Primer 2016

Pemilihan penentuan sampel ini didasarkan atas karakteristik dari populasi petani mitra bagi hasil yang memiliki sub karakteristik yang berbeda. Perbedaan itu terletak pada keikutsertaan petani terhadap kemitraan bagi hasil yang ada. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel yang dipakai oleh peneliti adalah 30 orang yang terdiri dari 16 orang anggota kemitraan penggarap lahan "Tetelan" dan 14 orang anggota kemitraan penyadap getah pinus. Metode yang digunakan oleh penulis untuk menentukan jumlah sampel dilakukan dengan *purposive*.

#### 4.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data sebagai bahan penulisan skripsi ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan dan atau responden kemudian jawaban-jawaban tersebut dicatat atau direkam dengan alat perekam oleh pewawancara (pengumpul data). Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan wawancara semi terstruktur. Wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dilakukan untuk mendapatkan

informasi atau data yang lebih dalam, utuh dan rinci. Wawancara ini dilakukan kepada para informan untuk memperoleh jawaban dari tujuan pertama tentang pola kemitraan dan aksesibilitas petani masyarakat desa hutan.

Peneliti juga melakukan wawancara secara semi terstruktur dengan menggunakan kuisioner. Tujuannya untuk mendapatkan data dari tujuan penelitian yang kedua dan ketiga yaitu tingkat penerapan serta tingkat pendapatan usahatani. Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap responden, yakni masyarakat desa/ petani anggota kemitraan bagi hasil di program PKPH.

#### b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian yang dalam penelitian ini adalah hutan program PKPH. Fungsi data dari dokumentasi adalah untuk melengkapi data yang ada, sekaligus untuk mendapatkan gambaran umum yang berkaitan dengan penerapan program PKPH di Desa Kucur. Dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung keadaan yang ada di lapang dan pelaksanaan program PKPH Desa Kucur. Teknik ini digunakan sebagai pendukung dari metode wawancara agar dapat memberikan kepastian tentang informasi hasil dari teknik wawancara.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, dan lain sebagainya baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data primer dan data sekunder pelaksanaan PKPH. Data sekunder bisa berupa dokumen resmi maupun tidak resmi dari instansi-intansi terkait seperti LKDPH, Perum Perhutani, Kelurahan. Sedangkan data primer adalah dokumentasi yang sengaja direkam sebagai bukti yang menguatkan hasil penelitian.

#### 4.5. Keabsahan Data

##### 1. Validitas

Dalam pengujian data, untuk mendapatkan data yang valid atau “data yang diperoleh tidak berbeda dengan data pada obyek peneliti” maka pada penelitian ini menggunakan uji Triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu pengujian validitas dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber, dari berbagai cara dan dari berbagai waktu. Masing-masing pengecekan tersebut bisa dilakukan sebagai berikut:

##### a. Triangulasi Sumber

Pengecekan ini dilakukan dengan menyatukan hasil data dari berbagai sumber lalu di deskripsikan/ dikategorikan hasilnya. Apabila terjadi perbedaan pandangan maka dalam penelitian ini harus di alami lagi untuk mengetahui alasan mengapa jawaban berbeda. Sesuai dengan metode penentuan sumber data di atas maka yang dimaksud sumberdata yang perlu dipadukan dalam penelitian ini adalah pihak Perum Perhutani dengan masyarakat desa.

##### b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan melakukan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini peneliti akan memadukan ketiga teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk saling mendukung data yang diperoleh agar valid.

##### c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini direncanakan bahwa pengumpulan data secara wawancara mendalam kepada pihak Perum Perhutani dilakukan pada waktu pagi/siang/sore secara bebas dan bervariasi. Pada pengumpulan data wawancara baik kepada informan maupun kepada sampel umumnya dilakukan di sore hari namun selain itu dilakukan juga wawancara serta observasi di lahan petani pada pagi hari sebagai penunjang.

##### 2. Reliabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji reliabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian (Sugiyono, 2008). Maka pada penelitian ini uji reliabilitas akan dilakukan juga ketika penelitian ini telah selesai. Pengujian ini adalah sekaligus ujian/sidang skripsi yang dilakukan penulis yang saat ini juga menjadi seorang mahasiswa. Pada pengujian ini akan dinilai standar kemutakhiran hasil penelitian oleh para peneliti senior seperti dosen yang memiliki banyak pengalaman dalam melakukan sebuah penelitian.

#### **4.6. Teknik Analisis Data**

Kegiatan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua jenis yang disesuaikan berdasarkan pendekatan penelitian. Pada pendekatan kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman sedangkan untuk pendekatan kuantitatif menggunakan analisis usahatani. Adapun dibawah ini mengenai penjelasan masing-masing dari analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Analisis Model Interaktif Miles dan Humbermman, merupakan metode analisis data melalui tiga aktivitas analisis yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data jenuh atau tidak didapatkannya lagi data baru dalam penelitian. Ketiga aktivitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

- a. Reduksi Data

Tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari berbagai sumber data baik dari Perum Perhutani maupun dari masyarakat desa hutan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil dari wawancara, observasi maupun dokumentasi ditampung kemudian data tersebut dipilih untuk dijadikan sebagai bahan jawaban penelitian. Sedangkan informasi yang kurang bersangkutan dengan rumusan masalah cukup dipindah dan tidak dimasukkan kedalam penelitian.

- b. Penyajian Data

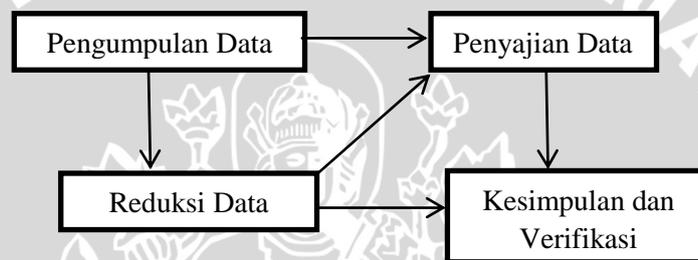
Penyajian data digunakan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian yang sesuai dengan tujuan penelitian dari gambaran keseluruhan PKPH. Pada tahap ini data hasil lapang diupayakan untuk

diklasifikasi dan disajikan sesuai pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada sub pokok permasalahan melalui penggunaan tabel.

### c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan sebagai jawaban penelitian dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan setiap temuan atau hasil data lapang. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari setiap sumber data penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar dalam penelitian.

Agar lebih jelas, dibawah ini digambarkan bagaimana tehnik analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman.



Gambar 2. Model Interaktif dalam Analisis Data

Sumber: Analisis Data Kualitatif Miles Huberman

2. Analisis pendapatan usahatani, menurut Soekartawi (1986) analisis pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan usahatani dengan total biaya usahatani. Sesuai dengan definisi yang telah disebutkan di atas dalam menganalisis usahatani di lahan “Tetelan” dalam kemitraan PKPH ini dilakukan dengan melakukan pengurangan total penerimaan usahatani petani dengan total biaya yang dikeluarkan oleh petani. Adapun rumusnya sebagai berikut:

- a. Rumus Pendapatan Usahatani Lahan “Tetelan”

$$\Pi = TR - TC$$

Dimana :

$\Pi$  = Pendapatan Usahatani Lahan “Tetelan”(Rp)

TR = Total Penerimaan Usahatni Lahan “Tetelan”(Rp)

TC = Total Biaya Usahatani Lahan “Tetelan”(Rp)

- b. Rumus Biaya Usahatani Lahan “Tetelan”

Biaya usahatani lahan “Tetelan” merupakan hasil penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel yang dikeluarkan petani dalam mengusahakan usahatannya di lahan hutan. Dalam penelitian ini jenis biaya yang masuk dalam biaya variabel adalah biaya benih, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya tenaga kerja, dan biaya polibag. Sedangkan jenis biaya yang masuk dalam biaya tetap adalah biaya iuran untuk kegiatan penyadapan getah pinus dan biaya penyusutan peralatan ajir tanaman.

Adapun secara matematis total biaya usahatani di lahan “Tetelan” dapat dituliskan dalam rumus berikut ini:

$$TC = FC + VC$$

Dimana :

TC = Total Biaya Usahatani Lahan “Tetelan”(Rp)

FC = Biaya Penyusutan Ajir + Biaya Iuran Tahunan (Rp)

VC = Biaya Benih + Biaya Pupuk + Biaya Pestisida + Biaya TK + Biaya Polibag (Rp)

c. Rumus Penerimaan Usahatani Lahan “Tetelan”

Penerimaan usahatani lahan “Tetelan” dapat diperoleh dari perkalian seluruh hasil produksi komoditas yang ditanam oleh petani lahan “Tetelan” dikalikan dengan harga jual masing-masing komoditas yang telah petani tanam di lahan “Tetelan”. Rumus matematis yang dapat digunakan untuk menghitung penerimaan tersebut adalah:

$$TR = P \times Q$$

Dimana :

TR = Total Penerimaan Usahatani Lahan “Tetelan”(Rp)

P = Harga Komoditas/kg di Lahan “Tetelan”(Rp)

Q = Jumlah Hasil Produksi Usahatani di Lahan “Tetelan”(kg)

d. Rumus Pendapatan Petani Penyadap Getah Pinus

Pendapatan petani penyadap getah pinus dihitung melalui perkalian jumlah getah pinus (kg) yang mampu dipanen petani dikalikan dengan harga beli getah pinus per kg oleh Perum Perhutani yaitu sebesar Rp3.000,-. Perhitungan pendapatan petani penyadap hampir sama dengan perhitungan pendapatan buruh tani dimana cara menghitungnya tidak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan.

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1. Deskripsi Umum Tempat Penelitian

#### 5.1.1. Letak Wilayah

Secara administratif Desa Kukur merupakan desa yang berada dalam administrasi Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Jarak tempuh dari Desa Kukur ke ibukota kecamatan adalah 10 km atau sekitar 20 menit perjalanan menggunakan motor. Sedangkan jarak untuk mencapai ibukota kabupaten yang berada di kawasan Kecamatan Kepanjen sekitar 15 km. Sesuai data dalam buku profil Desa Kukur tertulis secara astronomis desa ini berada di  $7^{\circ} 75',44.59''$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ}33',06,77''$  Bujur Timur.

Adapun lokasi Desa Kukur secara geografis dapat dilihat pada Gambar 3. Peta Kecamatan Dau Kabupaten Malang.



Gambar 3. Peta Kecamatan Dau Kabupaten Malang  
Sumber : Google, 2016

Berdasarkan Gambar 3. di atas menunjukkan bahwa Desa Kukur berada di bagian selatan-barat (barat daya) dari Kecamatan Dau. Sedangkan berdasarkan letak geografis Desa Kukur dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Desa Petung Sewu dan Desa Karang Widoro Kec. Dau
- Sebelah Barat : Hutan milik Perum Perhutani
- Sebelah Selatan : Desa Dalisodo Kec. Wagir
- Sebelah Timur : Desa Kalisongo Kec. Dau dan desa Landung Kec. Wagir

Desa Kucur memiliki topografi berupa dataran tinggi sekitar 2.494 m di atas permukaan laut dan memiliki lereng yang cukup curam. Ketinggian tersebut dikarenakan Desa Kucur berada di kaki Pegunungan Kawi. Di atas desa atau disebelah barat desa ini dibatasi oleh wilayah hutan produksi milik Perhutani yang memiliki luas sekitar 300 ha. Pada bagian atasnya lagi merupakan hutan lindung yang terdapat satwa maupun tumbuhan yang dilindungi negara. Meskipun letaknya berada di pegunungan, Desa Kucur tidak dilalui oleh sungai. Sedangkan menurut data 2008 curah hujan yang dimiliki Desa Kucur mencapai rata-rata 2.100 mm. Curah hujan tertinggi adalah pada akhir bulan November yang mencapai rata-rata hingga 400,04 mm. Luas wilayah yang dimiliki Desa Kucur adalah sebesar 717.00 ha yang kemudian dibagi menjadi tujuh dusun pedukuhan. Ketujuh dusun tersebut adalah : Dusun Krajan, Dusun Turi, Dusun Klampok, Dusun Klaseman, Dusun Godehan, Dusun Ketohan dan Dusun Sumberbendo.

### 5.1.2. Profil Kependudukan

#### A. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Perkawinan

Penduduk Desa Kucur berdasarkan data Adminsitrasi Pemerintah Desa tahun 2015 tercatat sebanyak 5.764 jiwa. Adapun penyajian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin disajikan pada Tabel 2. di bawah ini :

Tabel 2. Penggolongan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Kucur, 2015

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	2.914	50,5
2	Perempuan	2.850	49,5
Total		5.764	100,0

Sumber: Monografi Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang 2015

Berdasarkan Tabel 2. diketahui bahwa persentase penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Kucur antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan memiliki perbandingan 50,5:49,5. Secara rinci jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 2.914 jiwa dan sisanya adalah penduduk perempuan. Dengan demikian menunjukkan adanya keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan yang mana hanya memiliki selisih 64 jiwa saja.

Jumlah penduduk Desa Kucur di atas tercatat dalam 1.493 Kepala Keluarga. Dari data kepala keluarga yang ada di Desa Kucur masing-masing

penduduk secara individu terbagi dalam status perkawinan. Pada Tabel 3. Berikut ini akan disajikan status perkawinan penduduk Desa Kucur:

Tabel 3. Penggolongan Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Kucur, 2015

No	Status Perkawinan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Kawin	3.385	58,7
2	Belum Kawin	1.991	34,5
3	Duda	97	1,7
4	Janda	291	5,1
Total		5.764	100,0

Sumber: Monografi Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang 2015

Dari penyajian Tabel 3. di atas dapat diketahui bahwa 3.385 jiwa atau 58,7% penduduk telah kawin/berkeluarga, sedangkan 34,5% penduduk lainnya belum kawin. Sisanya yaitu 97 jiwa atau 1,7% penduduk memiliki status duda dan 291 jiwa atau 5,1% adalah janda. Dengan demikian bisa dikatakan penduduk Desa Kucur memiliki keharmonisan keluarga yang cukup baik dimana jumlah presenase janda dan duda kurang dari 10% dari total penduduk

#### B. Berdasarkan Usia

Penduduk Desa Kucur terbagi menjadi beberapa golongan berdasarkan golongan usianya. Adapun secara rinci akan disajikan pada Tabel 4. berikut ini :

Tabel 4. Penggolongan Penduduk Berdasarkan Golongan Usia di Desa Kucur, 2015

No	Golongan Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	0-5	450	7,8
2	6-10	464	8,1
3	11-20	875	15,2
4	21-30	883	15,3
5	31-40	969	16,8
6	41-50	915	15,9
7	51-60	641	11,1
8	61-70	333	5,8
9	71-80	184	3,2
10	81-90	44	0,8
11	91-100	2	0,03
12	>100	2	0,03
Total		5.764	100,0

Sumber: Monografi Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang 2015

Dari penyajian Tabel 4. di atas diketahui bahwa sebagian besar penduduk berada pada golongan usia antara 11 tahun hingga 50 tahun. Usia awal menginjak puber 11-20 tahun 875 jiwa atau 15,2%, kemudian usia 21-30 tahun 883 jiwa atau

15,3% dan 31-40 tahun 969 jiwa atau 16,8 %, dilanjutkan usia 41-50 tahun sebanyak 914 jiwa atau 15,9%. Pada golongan usia tersebutlah seorang penduduk dikategorikan sebagai usia produktif atau telah dan masih sanggup untuk bekerja dengan baik. Jika ditotal kelompok usia produktif ini memiliki persentase 63% dari seluruh penduduk Desa Kucur. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Kucur adalah penduduk yang produktif.

### C. Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikan

Penggolongan penduduk berikutnya adalah berdasarkan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Desa Kucur. Penggolongan pendidikan ini berdasarkan pendidikan formal yang dimulai dari tingkat tidak sekolah ataupun sempat sekolah tetapi tidak sampai lulus/selesai, kemudian Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas hingga tingkat perguruan tinggi. Hasil penggolongannya akan disajikan pada Tabel 5. dibawah ini :

Tabel 5. Penggolongan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Kucur, 2015

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	919	16,0
2	Tidak Tamat SD	1.229	21,2
3	SD	2.307	40,0
4	SMP	937	16,3
5	SMA	288	5,0
6	S-1 dan Selanjutnya	84	1,5
Total		5.764	100,0

Sumber: Monografi Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang 2015

Banyak penelitian menyampaikan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan meningkatkan kecakapan seseorang yang kemudian memberikan bekal seseorang untuk hidup yang lebih sejahtera. Apabila dilihat dari Tabel 4. menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Kucur memiliki latar belakang pendidikan sebatas SD yaitu sebesar 2.307 jiwa atau 40%. Bahkan jumlah penduduk yang tidak sekolah juga mencapai 919 jiwa atau 16%. Sedangkan untuk lulusan SMA dan S-1 keatas masing-masing hanya 288 jiwa atau 5% dan 84 jiwa atau 1,5%. Pendidikan sangat mempengaruhi sistematisa seseorang dalam berpikir maka dengan kondisi seperti ini cukup menghambat peran kegiatan pembangunan desa.

### C. Berdasarkan Pekerjaan Utama

Pada penggolongan ini, seluruh penduduk Desa Kucur digolongkan berdasarkan jenis mata pencariannya. Adapun penggolongan bisa dilihat pada Tabel 6. dibawah ini:

Tabel 6. Penggolongan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Pokok di Desa Kucur, 2015

No	Mata Pencarian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pelajar/ Mahasiswa	891	15,5
2	Belum bekerja	889	15,4
3	Mengurus Rumah Tangga	531	9,2
4	Petani/Pekebun	1.231	21,6
5	Buruh Harian Lepas	878	15,2
6	Buruh Tani	149	2,5
7	Tukan Batu	137	2,4
8	Buruh Pabrik	482	8,3
9	Pedagang	211	3,7
10	Pembantu Rumah Tangga	99	1,7
11	Lain-lain	266	4,5
Total		5.764	100,0

Sumber: Monografi Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang 2015

Berdasarkan Tabel 6. dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kucur memiliki mata pencarian sebagai petani yaitu sebesar 21,6% atau 1231 jiwa. Pada tabel di atas juga dibedakan antara petani dengan buruh tani, buruh tani memiliki presentas 2,5% jadi jika ditambah dengan golongan petani/pekebun maka cukup besar yang bekerja disektor pertanian. Golongan selanjutnya yang cukup besar juga adalah kelompok pelajar/mahasiswa, golongan belum bekerja, dan golongan buruh harian lepas yang masing-masing memiliki presentase sekitar 15%.

#### 5.1.3. Profil Pertanian

Desa Kucur bisa disebut sebagai desa pertanian, yang mana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian seperti yang ditunjukkan pada keterangan sebelumnya mengenai penggolongan penduduk berdasarkan mata pencaharian utama. Selain dilihat dari jumlah penduduk yang berkerja sebagai petani dari total luas wilayah pun bisa dijadikan indikator bahwa Desa Kucur adalah desa pertanian. Dari 717 ha lauasan lahan yang dimiliki oleh Desa Kucur sebagian besar luasannya digunakan sebagai lahan pertanian/perkebunan. Berdasarkan luas

lahan untuk peruntukannya wilayah Desa Kucur dibagi menjadi beberapa peruntukan, sesuai dengan data pada Tabel 7. dibawah ini:

Tabel 7. Pembagian Luasan Wilayah Berdasarkan Peruntukannya di Desa Kucur, 2015

No	Peruntukan	Jumlah (hektar)	Persentase (%)
1	Lahan Pemukiman	136,0	19,0
2	Lahan Pertanian	464,0	65,0
3	Lahan Perkebunan	107,5	15,0
4	Sekolah	2,5	0,003
5	Tempat Beribadatan	3,5	0,004
6	Pemakaman	3,5	0,004
Total		717,0	100,0

Sumber: Monografi Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang 2015

Berdasarkan penyajian Tabel 7. di atas menunjukkan bahwa dari total luas lahan desa dibagi menjadi 136,05 ha sebagai pemukiman, 464 ha sebagai lahan pertanian, 107,53 ha sebagai perkebunan, dan sisanya sebagai fasilitas umum. Tepatnya 80% dari luas lahan yang ada di Desa Kucur diperuntukan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Meskipun demikian tercatat juga kondisi sebaran lahan berdasarkan kategori kesuburan tanahnya yang saat ini menunjukkan 250 ha subur, sedangkan 150 ha sedang, dan sisanya termasuk kategori kritis. Selain lahan milik Desa Kucur yang dibagi berdasarkan peruntukannya, di wilayah Desa Kucur juga terdapat lahan hutan produksi milik Perum Perhutani yaitu seluas kurang lebih 300 ha.

Jenis pertanian yang diterapkan oleh masyarakat Desa Kucur adalah jenis pertanian di lahan kering. Di desa ini tidak terdapat sawah 1 petak pun. Sulitnya sumber air yang mampu mengairi ladang menjadi alasan satu-satunya ketiadaan sawah disini. Jangankan untuk pengairan lahan masyarakat Desa Kucur, untuk kegiatan masak mandi saja 1 desa ini mengandalkan 1 sumber yang ada di dalam hutan dimana setiap bulannya masyarakat harus membayar.

Kegiatan pertanian lahan kering atau juga disebut lahan tadah hujan tidak bisa ditanami sepanjang tahun. Sama halnya pada Desa Kucur, kegiatan pertanian dimulai setelah datangnya musim hujan saja. Biasanya hujan akan mulai turun pada akhir Bulan November dan habis pada Bulan Mei. Maka pada bulan-bulan tersebut terjadi aktivitas pertanian. Sedangkan pada bulan-bulan setelah itu atau ketika musim kemarau datang, petani akan mencoba mencari alternatif kegiatan

lain. Umumnya selain menjadi petani, masyarakat Desa Kucur juga memiliki mata pencarian lain seperti menjadi penyadap getah pinus perhutani, peternak, kuli bangunan, kuli batu, buruh tani keluar desa pada musim kemarau. Jenis ternak yang banyak dipelihara oleh petani adalah sapi dan kambing.

Dengan kondisi yang sedemikian maka masyarakat Desa Kucur memiliki strategi agar meskipun pada musim kemarau tetap mendapat penghasilan dari pertanian maka diusahakanya tanaman tahunan seperti cengkeh, jeruk, kopi, tebu dll. Strategi yang lain yang biasa dilakukan masyarakat agar mendapat penghasilan yang cukup maka dibiasakanya menanam dengan sistem tumpang sari. Pada sistem tumpang sari ini dalam satu luasan lahan pertanian biasanya diisi oleh 3 sampai 4 jenis tanaman semusim secara bersamaan. Contoh yang sering dijadikan kombinasi adalah tanaman cabai kecil ditanam bersama terong, jahe, bunga kol, buncis dan lainnya.

Selain tumpang sari, sistem penanaman komoditas juga secara tumpang gilir. Ketika tanaman yang secara tumpang sari ini masih ada tapi mungkin sudah tua atau hasilnya sudah menurun maka dengan segera masyarakat menanami dengan tanaman lain tanpa menghilangkan tanaman sebelumnya yang masih hidup tersebut. Harapan yang diinginkan petani dengan sistem demikian adalah agar mendapat panen secara terus menerus sehingga hasilnya akan lebih besar. Bagi masyarakat Desa Kucur yang memiliki rumah berdekatan dengan hutan juga bertani di hutan yaitu dibawah hutan pinus milik Perum Perhutani.

Dari ketujuh dusun/pedukuhan yang ada di Desa Kucur, masing-masing dusun memiliki ciri khusus utamanya dalam upaya pertaniannya. Dusun Klampok dan Dusun Turi memiliki kemiripan, disini pertanian tidak terlalu menjadi pekerjaan masyarakat karena beberapa bekerja diluar sektor pertanian yaitu sebagai buruh pabrik. Ini disebabkan karena jaraknya memang paling dekat dengan pabrik. Komoditas yang sering dijumpai dibudidayakan oleh masyarakat dusun ini adalah ketela atau singkong. Kemudian Dusun selanjutnya adalah Dusun Klaseman, Dusun Godehan, dan Dusun Ketohan, ketiga dusun ini juga memiliki kemiripan yaitu dari jenis komoditas yang dibudidayakan. Umumnya jenis komoditas yang sering dibudidayakan masyarakat pada dusun ini adalah cabai kecil, jagung, jahe, dan tebu. Dusun berikutnya adalah Dusun Krajan dan Dusun

Sumberbendo pada kedua dusun ini mulai banyak dijumpai oleh komoditas Jeruk Batu Keprok 55. Kedua dusun ini mengikuti program pemerintah sebagai daerah pengembangan komoditas jeruk tersebut. Namun di Dusun Sumberbendo yang paling banyak menanam jeruk ini. Selain jeruk komoditas lain yang ditanam adalah cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, tomat, terong, dan lain sebagainya.

Enam dusun yang ada yaitu Dusun Kerajan, Dusun Ketohan, Dusun Godehan, Dusun Klaseman, Dusun Klampok, dan Dusun Turi berada dikawasan yang berdekatan masing-masing memiliki memiliki jarak yang berdekatan dengan kantor kelurahan. Sedangkan Dusun Sumberbendo berada di lokasi terpencil dan dikelilingi oleh lahan-lahan yang luas. Jika dibandingkan kondisi pertaniannya dari setiap dusun yang ada di Desa Kucur, Dusun Sumberbendo yang paling maju ini bisa dilihat dari macam komoditas yang dibudidayakan lebih banyak dan umumnya adalah komoditas dengan nilai ekonomis tinggi. Selain itu di Dusun Sumberbendo memiliki kelembagaan kelompok tani yang cukup maju dan sebagai pioner kelompok tani di Desa Kucur.

#### 5.1.4. Sarana dan Prasarana

Adapun fasilitas sarana prasarana yang dimiliki Desa Kucur saat ini bisa dilihat pada Tabel 8. berikut ini :

Tabel 8. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Kucur, 2015

No	Sarana dan Prasaranan	Jumlah	Keterangan
1	Gd. Kantor Desa	1	Baik
2	Gd. Balai Desa	1	Baik
3	Gd. PAUD	1	Baik
4	Gd. TK	4	Baik
5	Gd. SD/MI	4	Baik
6	Gd. SMP/MTS	2	Baik
7	Gd. SMA	0	Belum Ada
8	Gd. Masjid	8	Baik
9	Gd. Mushola	18	Baik
10	Gd. Gereja	1	Baik
11	Gd. TPA/TPQ	9	Baik
12	Gd. PONKESDES	1	Atap Rusak
13	Gd. POSYANDU	1	Baik
14	Gd. Pasar Desa	0	Belum Ada
15	Gd. POSKAMPLING	12	Sederhana
16	Gd. Balai Pengobatan	1	Baik
17	Gd. Jembatan	15	Baik dan Rusak

Sumber: Monografi Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang 2015

Berdasarkan Tabel 8. Menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Kucur cukup baik. Hampir semua fasilitas dalam kondisi yang baik. Hanya beberapa sarana yang kurang, seperti keberadaan gedung SMA yang tidak ada di Desa Kucur. Mungkin hal ini juga yang kemudian menyebabkan presentase tingkat pendidikan penduduk yang sampai tingkat SMA masih terbatas.

Sarana prasarana lain yang mungkin perlu diperbaiki adalah gedung PONKESDES yang terdata dalam kondisi atap rusak. PONKESDES memiliki peran penting dalam memeriksa dan mengobati anggota masyarakat yang sedang sakit. PONKESDES adalah tempat untuk memeriksa kesehatan yang terdekat dari rumah masyarakat. Jika dilihat jarak tempuh desa cukup jauh dengan rumah sakit yang lain. Apabila kondisi gedung ini diperbaiki maka akan meningkatkan pelayanan petugas dan mempengaruhi kesembuhan dari masyarakat desa.

Selain itu jika ditinjau dari keberadaan gedung pasar yang tidak ada, dapat menghambat distribusi prodak-prodak lokal dan pertukaran uang. Jika ada gedung pasar yang layak, ini mampu mengurangi intensitas masyarakat dalam desa untuk pergi ke pasar yang ada diluar desa. Dengan demikian akan mengurangi ongkos berbelanja. Selain itu adanya pasar akan mempermudah masyarakat yang memiliki prodak-prodak lokal untuk menjualnya.

Dari segi keamanan, di Desa Kucur terdapat 12 Poskampling. Namun kondisinya belum baik atau bisa dikatakan sederhana. Poskampling belum bersifat permanen, umumnya masih dari dinding kayu belum bentuk dinding tembok. Diperlukan adanya perbaikan kondisi poskampling, karena dengan keadaan poskampling yang baik akan membuat penjaga lebih nyaman sehingga bisa menjaga keamanan dengan baik.

## **5.2. Karakteristik Petani Mintra**

### **5.2.1. Karakteristik Petani Mitra Berdasarkan Umur**

Umur produktif adalah umur dimana seseorang bisa dikatakan masuk kedalam usia kerja. Di Indonesia umur produktif dimulai sejak umur 15 tahun hingga umur 64 tahun. Adapun dibawah ini data petani mitra menurut golongan umur di Desa Kucur dapat dilihat pada Tabel 9. sebagai berikut:

Tabel 9. Jumlah Petani Mitra Berdasarkan Golongan Umur di Desa Kucur, 2016

No	Golongan Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	<30	0	0,0
2	31-40	4	13,0
3	41-50	7	23,0
4	51-60	11	37,0
5	61-70	6	20,0
6	>70	2	6,0
Total		30	100,0

Sumber: Data Primer, 2016

Dari hasil data jumlah petani mitra berdasarkan umur pada Tabel 9. diketahui bahwa jumlah petani mitra dibawah golongan umur dibawah 30 tahun tidak ada. Kemudian golongan umur umur 31-40 tahun terdapat 4 orang atau 13% dari total, golongan selanjutnya umur 41-50 tahun memiliki presentase sebesar 23% atau 7 orang. Golongan umur ketiga yaitu usia 51-60 tahun terdapat 11 orang atau persentasenya 37%, berikutnya golongan umur 61-70 tahun memiliki presentase 20% atau 6 orang dan golongan terakhir umur di atas 70 tahun hanya 2 orang atau 6%.

Hasil di atas menunjukkan bahwa secara umum responden dalam penelitian ini memiliki sebaran yang cukup seimbang dimana golongan umur paling banyak hanya memiliki presentase sebesar 37% saja dengan diikuti golongan umur lain yang memiliki proporsi hampir sama. Golongan umur paling banyak diketahui berada pada umur 51-60 tahun, namun pada golongan umur berikutnya 41-50 tahun juga cukup besar. Golongan usia tersebut sebenarnya merupakan golongan usia tua dikalangan penduduk umum, atau mendekati usia tidak produktif. Namun dengan melihat kondisi fisik petani mitra yang ada di Desa Kucur meskipun berumur tua tapi kesehatan mereka masih baik, dan masih kuat untuk ikut dalam pengelolaan hutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petani yang mengikuti program PKPH di Desa Kucur sebagian besar di usia antara tua yaitu golongan umur 51-60 tahun.

### 5.2.2. Karakteristik Petani Mitra Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan formal. Pendidikan formal di Indonesia dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun data

karakteristik petani mitra menurut tingkat pendidikan bisa dilihat pada Tabel 10. dibawah ini :

Tabel 10. Jumlah Petani Mitra Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Kucur, 2016

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	16	53,0
2	SD	12	40,0
3	SMP	2	7,0
Total		30	100,0

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan Tabel 10. di atas menunjukkan bahwa 53% dari petani mitra program PKPH memiliki latar belakang pendidikan tidak tamat SD. Kemudian 40% memiliki latar belakang lulus atau tamat SD. Sisanya 7% merupakan lulusan SMP. Sebagian besar petani mitra penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan yang tidak tamat SD. Mereka pernah mengenyam pendidikan SD namun berhenti dan tidak melanjutkannya sampai lulus. Selanjutnya petani mitra dengan tamatan SD juga cukup banyak. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden tergolong rendah. Keterbatasan ekonomi serta faktor sosial lain menjadi penyebab dulu tidak memiliki pendidikan yang tinggi.

### 5.2.3. Karakteristik Petani Mitra Berdasarkan Jumlah Tanggung Keluarga

Jumlah anggota dalam keluarga petani mitra dapat dilihat pada Tabel 11. berikut ini :

Tabel 11. Jumlah Petani Mitra Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga di Desa Kucur, 2016

No	Jumlah Tanggungan Keluarga	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	1	1	3,0
2	2	4	14,0
3	3	10	33,0
4	4	5	17,0
5	5	10	33,0
6	>5	0	0
Total		30	100,0

Sumber: Data Primer, 2016

Dari Tabel 11. di atas dapat diketahui jika dari 30 total petani mitra jumlah anggota keluarga terdiri 1 orang hanya 3% atau 1 responden, jumlah anggota keluarga 2 orang dipunyai 4 responden atau sebesar 14%, jumlah anggota keluarga 3 orang ada 10 responden atau 33%, jumlah anggota keluarga 5 orang terdapat di

10 responden atau persentasenya 33% dan di atas jumlah 5 anggota keluarga tidak ada. Sehingga dapat diketahui bahwa sebagian besar petani memiliki tanggungan keluarga sebanyak 3 dan 5 orang. Umumnya yang terdiri dari 3 keluarga hanya terdiri dari suami istri dan satu anak. Sedangkan yang beranggotakan 5 orang berisi ayah ibu kemudian anak, menantu dan seorang cucu.

#### 5.2.4. Karakteristik Petani Mitra Berdasarkan Kombinasi Pekerjaan Utama dan Sampingannya

Jenis pekerjaan petani mitra akan mempengaruhi jenis keikutsertaannya dalam pengelolaan hutan dalam kemitraan PKPH. Karena kondisi alam yang memungkinkan kegiatan pertanian tidak bisa dijalankan sepanjang tahun maka semua petani mitra memiliki pekerjaan utama dan sampingan. Pekerjaan utama petani bisa dilakukan di musim penghujan sedangkan ketika musim kemarau petani mitra akan bekerja dilain sektor. Adapun dibawah ini akan ditunjukkan oleh Tabel 12. tentang kombinasi pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan dari petani mitra.

Tabel 12. Jumlah Petani Mitra Berdasarkan Kombinasi Pekerjaan Utama dan Sampingannya di Desa Kucur, 2016

No	Kombinasi Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Pabrik-Penyadap	1	3,0
2	Kasun-Petani	1	3,0
3	Petani-Kuli Bangunan	3	10,0
4	Petani-Buruh Tani	4	13,3
5	Petani-Peternak	4	13,3
6	Petani	4	13,3
7	Petani-Penyadap	13	44,0
	Total	30	100,0

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan jenis kombinasi pekerjaan petani mitra dari Tabel 12. di atas dapat diketahui bahwa umumnya petani selain memiliki kombinasi pekerjaan sebagai petani-penyadap yang secara sengaja oleh peneliti diberi proporsi paling banyak yaitu 13 orang atau 44% terdapat kombinasi lain yaitu Petani-Kuli, Petani-Buruh tani, Petani Peternak dan Petani saja tanpa pekerjaan sampingan lain masing-masing 4 orang dengan presentase 13,3%. Kondisi yang umum di Desa Kucur adalah kombinasi petani dengan buruh tani, peternak, kuli bangunan. Masyarakat desa hutan yang memiliki kombinasi pekerjaan petani penyadap secara keseluruhan hanya 22 orang saja.

### 5.3. Pola Kemitraan dan Aksesibilitas Petani

#### 5.3.1. Pola Kemitraan PKPH di Desa Kucur

Kemitraan dalam program Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan (PKPH) menurut pengelola Perum Perhutani di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang secara sah dimulai sejak tahun 2004. Namun pelaksanaannya secara *real* sudah dimulai sejak tahun 2001 dimana ketika itu sudah dimulainya program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di seluruh Hutan Jawa dan Madura. Pengelola Perum Perhutani juga membenarkan apa yang disampaikan Kusdamayanti pada 2008 bahwa di Kabupaten Malang terjadi penyesuaian nama program PHBM menjadi PKPH serta kesepakatan itu secara sah baru bisa dimulai pada tahun 2004. Selain itu terdapat penyesuaian penyebutan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menjadi Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH). Penyesuaian ini disebabkan adanya permintaan penyesuaian dari pemerintah daerah melalui Bupati dan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang kepada Perum Perhutani selaku perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kewenangan mengelola hutan produksi negara serta mengeluarkan keputusan dan pengaturan program PHBM tersebut.

Program PHBM yang dikeluarkan Dewan Pengawas Perum Perhutani melalui SK nomor 136/KPTS/DIR/2001 pada 2001 ini sebenarnya telah berjalan di Desa Kucur dengan sesuai atau tidak ada penundaan pelaksanaan. Hanya saja terdapat upaya penyesuaian program dari pihak-pihak terkait hingga tahun 2004. Pada tahun tersebutlah secara sah program PHBM disesuaikan menjadi PKPH serta sudah memiliki pengaturan yang jelas yang disetujui semua pihak. Upaya penyesuaian program ini dilakukan dengan cara melakukan dialog antara pihak Perum Perhutani, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, wartawan, beberapa *stakeholder* swasta dan beberapa pihak lain (Kusdamayanti, 2008). Meskipun terdapat penyesuaian program, PKPH tetap memiliki isi, prinsip, jiwa, dan pelaksanaan yang sama dengan PHBM.

Pihak utama dalam program PKPH adalah Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Pihak Perum Perhutani yang mengurus PKPH di Desa Kucur adalah satuan unit kerja di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Selorejo, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kepanjen di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang. Pada bagian satuan kerja ujung bawah yang sering

berkomunikasi dan bertanggung jawab di lapangan dari pihak Perum Perhutani adalah Mandor dan Mantri Hutan yang berkantor di RPH Selorejo Kec. Dau. Setiap RPH yang ada dipimpin oleh seorang Mantri yang kemudian dibantu oleh beberapa mandor yang memiliki sub bidang tertentu misal mandor tanam, mandor bibit, mandor tebang dan lainnya. Resort Pemangkuan Hutan Selorejo ini selain bertanggung jawab atas PKPH Desa Kucur juga bertanggung jawab atas PKPH di desa lain di kawasan Kecamatan Dau.

Sedangkan sebagai wakil dari masyarakat desa hutan di Desa Kucur adalah Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH) Wonolestari. Keberadaan lembaga ini merupakan salah satu syarat utama suatu desa bisa menjalankan sebuah program PKPH. Berdasarkan Pedoman PHBM yang dimaksud oleh LKDPH atau LMDH adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan. Setiap LKDPH harus memiliki struktur organisasi yang jelas, terdapat keanggotaan, memiliki agenda yang jelas dan memiliki surat izin sebagai lembaga yang sah. Peran utamanya adalah bersama dengan Perum Perhutani merencanakan kegiatan, Melaksanakan kegiatan serta melakukan Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) secara berkala.

Tujuan utama program PKPH adalah melakukan pengelolaan sumber daya hutan dengan memperhatikan kelestarian hutan dimasa datang serta dilandasi oleh jiwa berbagi antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Dalam memutuskan memulai program PKPH membutuhkan tahap-tahapan proses yang cukup panjang. Di buku pedoman diatur bahwa penyusunan rencana PKPH memerlukan kajian khusus seperti inventaris sumber daya hutan, setelah diketahuui potensi sumber daya kemudian dilakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Kedua pihak utama ini memiliki wewenang yang sama untuk saling menyampaikan ide-idenya hingga nanti diakhiri dengan perjanjian kemitraan. Isi perjanjian adalah semua yang menyangkut keseluruhan pelaksanaan program PKPH. Jika semua pihak telah sepakat maka dilakukan penandatanganan antar kedua pihak utama serta *stakeholder*. Dalam hal ini dari pihak Perum

Perhutani yang berhak/bertanggung jawab adalah Administratur/ Kepala Pemangku Hutan (KKPH) Malang sedangkan pihak masyarakat adalah LKDPH Wonolestari.

Pelaksanaan program PKPH di Desa Kucur dilakukan dengan 2 kegiatan yaitu penyadapan getah pinus dan penggarapan lahan “Tetelan” (dibawah tegakan). Berdasarkan perjanjian dalam PKPH sistem penyadap getah dan penggarap “Tetelan” dilakukan secara bersamaan atau dengan kata lain petani yang berhak mengikuti kemitraan penggarap lahan “Tetelan” juga harus mengikuti kemitraan penyadap getah pinus, namun karena peminat anggota kemitraan penyadap sedikit maka disesuaikanlah peraturan di perjanjian.

Penyesuaian tersebut kemudian memisahkan kemitraan menjadi 2 yaitu kemitraan penyadap getah sekaligus penggarap “Tetelan” dan kemitraan penggarap “Tetelan”. Sistem bagi hasil penyadapan getah pinus adalah petani anggota kemitraan melakukan pemanenan getah pinus milik Perum Perhutani kemudian hasil panen akan dibagi hasil kepada petani tersebut dan bisa mengikuti kemitraan penggarap “Tetelan”. Sedangkan sistem penggarapan lahan “Tetelan” adalah petani anggota kemitraan penggarap lahan “Tetelan” bukan penyadap yang melakukan penanaman tanaman pertanian di bawah pohon utama dengan kewajiban membantu menjaga kelestarian pohon utama serta ikut membantu kegiatan penyadapan getah pinus.

Bentuk bantuan dari kemitraan penggarap lahan “Tetelan” terhadap kemitraan penyadap dilakukan dengan membantu biaya operasional penyadap yang nominalnya disesuaikan kemampuan petani dan jumlah luasan lahan “Tetelan”, namun umumnya biaya tersebut sekitar Rp 50.000,-/ 0,25 ha/ tahun. Bentuk bantuan ini biasanya dikumpulkan melalui kelompok tani kemitraan penggarap lahan kemudian uang disetor ke Perum Perhutani untuk digunakan membeli peralatan sadapan pinus yang biasanya berupa kerok getah, batok kelapa, sepatu boot, dll.

Kelestarian hutan adalah fokus tujuan utama dari kemitraan program PKPH selain tujuan keuntungan ekonomi dan keadilan sosial. Inilah yang membedakan kemitraan dalam program PKPH dengan pola kemitraan yang lain. Umumnya kemitraan yang lain hanya memfokuskan pada keuntungan ekonomi

saja. Namun apabila dibandingkan dengan kemitraan yang telah di atur di UU No.20 tahun 2008, kemitraan PKPH sistem penyadap getah pinus hampir memiliki kesamaan dengan pola kemitraan subkontrak yang ditandai dengan pembuatan kontrak perjanjian sebelum program dimulai dan adanya kesamaan ciri adanya dukungan yang diberikan oleh usaha besar yaitu kesempatan usaha kecil mengerjakan sebagian produksi maupun komponennya; kesempatan usaha kecil memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan; memberi bimbingan dan kemampuan teknis usaha; perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi; upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak (UU No.20 tahun 2008). Sedangkan pada sistem penggarap lahan “Tetelan” sulit bila disamakan dengan pola kemitraan yang telah ada karena tidak memiliki kesamaan ciri.

Selain LKDPH Wonolestari, PKPH di Desa Kucur terdapat kelembagaan non formal yang berkaitan dengan pengelolaan hutan berupa kelompok tani hutan. Ada tiga kelompok tani hutan yaitu Kelompok Tani Hutan Sumberbendo 1, Kelompok Tani Hutan Sumberbendo 2 dan Kelompok Tani Penyadap. Masing-masing lembaga ini memiliki fungsi untuk memudahkan komunikasi antar petani dan komunikasi dengan Perum Perhutani. Semua kelompok tani hutan tersebut letaknya hanya di Dusun Sumberbendo. Hal ini karena lokasi dusun ini berjauhan dengan dusun lainnya sehingga sulitnya jika dikoordinasikan oleh LKDPH Wonolestari yang berlokasi di Dusun Krajan. Selain lokasi yang jauh, aktivitas pertanian di Dusun Sumberbendo juga lebih aktif daripada dusun lainnya. Sedangkan pada dusun yang lain fungsi kelembagaannya dilakukan oleh LKDPH Wonolestari.

Meski terdapat kelembagaan yang jelas namun kegiatan dari masing-masing lembaga tidak berjalan dengan baik. Tidak adanya kegiatan pertemuan yang jelas, kemudian pendataan anggota yang kurang maksimal menjadi indikator ketidak berjalanya lembaga tersebut. Lembaga LKDPH Wonolestari dan kelompok tani hutan terkesan hanya sebagai tempat pengumpulan sumbangan untuk kegiatan oprasional penyadap. Karena dalam setahun kegiatan yang pasti adalah kegiatan tersebut. Hanya kelompok kemitraan hutan penyadap yang sering melakukan pertemuan serta memiliki cukup banyak kegiatan yang pasti. Kegiatan

tersebut utamanya untuk peningkatan hasil perolehan sadapan yang didapat oleh petani penyadap.

Terdapat lebih dari 150 petani anggota PKPH yang tersebar di empat dari tujuh dusun/pedukuhan yang ada di Desa Kucur. Keempat dusun tersebut adalah Dusun Sumberbendo, Dusun Krajan, Dusun Godehan dan Dusun Ketohan. Jumlah anggota yang tidak pasti ini disebabkan oleh tidak adanya data yang jelas baik dari LKDPH Wonolestari maupun dari RPH Selorejo. Dari keseluruhan petani anggota PKPH Desa Kucur yang mengikuti kemitraan penyadap getah hanya 22 petani saja yang seluruhnya ada di Dusun Sumberbendo. Jumlah ini sangat sedikit dibandingkan jumlah petani yang mengikuti kemitraan penggarap lahan "Tetelan". Kemitraan penyadap lebih diutamakan oleh pihak Perum Perhutani karena dalam kemitraan tersebut berkaitan dengan bisnis Perum Perhutani sebagai perusahaan pengolah produk getah pinus. Petani yang ikut kegiatan sadapan tidak berhak membayar iuran operasional penyadap, malah sebaliknya penyadap berhak atas peralatan sadapan yang berupa *banji* (cangkul koakan), talang, sprayer, sarung tangan, sepatu boot atau lapang, seragam dan peralatan lainnya secara gratis. Pada kemitraan penyadap getah, petani juga berhak untuk mendapat luasan lahan "Tetelan" yang lebih luas dengan bebas dari kewajiban membayar iuran.

### 5.3.2. Aksesibilitas Petani

Aksesibilitas petani desa hutan merupakan peluang bagi petani masyarakat desa hutan untuk memperoleh kesempatan ikut mengelola hutan melalui kemitraan penggarap lahan "Tetelan" dan kemitraan penyadap getah pinus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika petani memiliki aksesibilitas yang besar artinya tidak sulit untuk bisa ikut dalam kemitraan program PKPH. Program PKPH dijalankan dengan jiwa keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, ekologi. Salah satu nilai dalam aspek sosial yang dibangun di dalam program ini adalah keadilan. Nilai ini dibangun dengan tidak membatasi siapapun untuk ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan. Tidak ada pembatasan terhadap karakteristik masyarakat tertentu untuk bisa terlibat di dalam pengelolaan hutan program PKPH. Sejak awal pembukaan pelaksanaan program PKPH di tahun 2001

dilakukan secara adil dan terbuka, seluruh masyarakat desa hutan tanpa terkecuali bisa ikut serta dalam program pengelolaan hutan ini.

Program PKPH dulu diawali dengan *babat* hutan atau pembukaan hutan gundul atau rusak yang masuk dalam lokasi program PKPH, kemudian ditanami pepohonan kembali oleh petani masyarakat desa hutan peserta kemitraan. Pada kegiatan *babat* hutan inilah yang kemudian menentukan letak serta luasan lahan yang dimiliki karena pada saat itu semua peserta secara bebas berebut lokasi yang paling sesuai. Dulu diawal program tidak ada pengaturan pembagian secara teratur, karena hal tersebut akan menimbulkan kecemburuan sehingga pada saat itu bagi petani yang datang lebih awal serta memiliki kekuatan membabat lebih luas maka petani tersebut akan mendapat luasan yang diinginkannya. Dengan petani ikut mengelola hutan dengan menanam pepohonan petani tersebut juga diizinkan menanam tanaman pertanian sebagai di sela-sela pohon tersebut. Setelah pohon itu besar dan rimbun yaitu sekitar umur 6 tahun, maka petani tidak bisa mengusahakan tanaman pertanian lagi. Kemudian untuk mendapatkan lahan “Tetelan” petani harus pindah ke tempat yang lebih memungkinkan dengan cara membuka lahan hutan kembali.

Namun untuk pindah lokasi membutuhkan pengkajian yang cukup lama serta tidak bisa dipastikan waktunya, sehingga ketika lahan “Tetelan” awal sudah tidak memungkinkan ditanami karena kondisi pohon yang rimbun maka petani tersebut membuka di lahan lain yang sesuai untuk pertanian meski lahan tersebut tidak dibuka secara resmi oleh Perum Perhutani dan LKDPH. Kondisi inilah yang terjadi di program PKPH Desa Kucur yaitu tidak semua lahan yang dikelola kemitraan PKPH merupakan lahan resmi. Sebelumnya hal ini mendapat larangan oleh Perum Perhutani karena menyalahi aturan. Untuk tetap dapat memperoleh pendapatan petani masyarakat desa hutan didorong oleh Perum Perhutani untuk ikut dalam kegiatan kemitraan penyadap getah, namun tetap saja sebagian besar masyarakat kurang tertarik dengan dorongan tersebut.

Dalam kegiatan usahatani lahan “Tetelan” di lahan yang tidak resmi ini dimaklumi oleh pihak Perum Perhutani dengan alasan kemanusiaan dan agar masyarakat desa hutan memiliki pandangan yang baik terhadap Perum Perhutani sehingga nantinya saling menjaga kepercayaan dan silaturahmi untuk bersama-

sama mengelola hutan. Petani penggarap lahan “Tetalan” tersebut akhirnya diizinkan menanam hanya dilokasi yang disadap oleh penyadap dan bertanggung jawab menjaga kelestarian pohon pinus tersebut. Petani penggarap “Tetalan” juga wajib izin terlebih dahulu kepada petani penyadap di lahan yang ditanaminya. Karena penyadapan hanya ada di Dusun Sumberbendo maka, kondisi yang demikian hanya terjadi di Dusun Sumberbendo.

Pembukaan lahan hutan PKPH yang terakhir dilakukan di desa Kucur terjadi pada tahun 2013. Dengan pembukaan baru tersebut maka ada sekitar 15 ha, luasan hutan yang telah dibuka agar dikelola oleh masyarakat. Lokasi ini terbagi di empat dusun yang ada di Desa Kucur. Penambahan bukaan baru ini juga dilakukan secara terbuka atau bisa dikerjakan oleh masyarakat desa hutan tanpa ada pembagian khusus. Dengan demikian sistem yang terbuka ini memungkinkan seorang petani memiliki lahan “Tetalan” yang luas dan terbagi di beberapa plot/lokasi.

Mangacu pada pemilikan aset petani mitra untuk menegetahui bagaimana sebaran pemilikan asetnya merata atau tidak sebagai bentuk keadilan dalam aksesibilitas bisa dilihat dari Tabel 13 dan 14 berikut ini:

Tabel 13. Jumlah Petani Mitra Berdasarkan Pemilikan Luas Rumah di Desa Kucur, 2016

No	Golongan Luas Rumah ( $m^2$ )	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	< 51	8	27,0
2	51-75	13	43,0
3	76-100	6	20,0
4	101-125	0	0,0
5	>125	3	10,0
Total		30	100,0

Sumber: Data Primer, 2016

Menurut penyajian Tabel 13. dapat diketahui bahwa pemilikan rumah petani mitra cukup merata yaitu terdapat ukuran rumah yang kurang dari 51  $m^2$ , pada kelompok rumah ukuran ini terdapat 8 responden atau 27% kemudian pada ukuran 51-75  $m^2$  terdapat 13 responden atau 43%. Pada kelompok selanjutnya yaitu ukuran rumah 76-100  $m^2$  terdapat 6 responden atau 20%, pada kelompok 101-125  $m^2$  tidak ada dan kelompok terakhir, yang memiliki rumah berukuran lebih dari 125  $m^2$  ada 3 responden atau 10%.

Kemudian berdasarkan kondisi bangunan rumah, dari 30 petani mitra yang diambil 6 petani memiliki kondisi bangunan yang semi permanen. Kondisi semi permanen tersebut dilihat dari kondisi tembok yang belum terbuat dari batu bata atau masih menggunakan anyaman bambu. Selain itu kondisi alas rumah masih belum dipondasi atau masih tanah saja. Kemudian 24 diantaranya sudah memiliki kondisi yang baik.

Dari aspek penting lain yang dapat menjadi indikator kekayaan seorang petani lain seperti aset lahan milik sendiri bisa dilihat di tabel 14 berikut ini:

Tabel 14. Jumlah Petani Mitra Berdasarkan Pemilikan Luas Lahan Milik di Desa Kucur, 2016

No	Luas Lahan Milik (ha)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	0	3	10
2	0,1-0,25	16	53
3	0,26-0,5	7	23
4	0,51-0,75	4	14
5	> 0,75	0	0
Total		30	100,0

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan Tabel 14. dapat diketahui bahwa sebagian besar petani mitra memiliki luas lahan milik pribadi sebesar 0,1-0,25 ha yaitu sebesar 16 orang atau 53 %. Kelompok selanjutnya yang ada 7 orang atau 23% yang memiliki lahan milik sebesar 0,26-0,5 ha. Bahkan ada juga yang tidak memiliki lahan milik sama sekali, ini terjadi di 3 responden. Petani mitra lainnya yang memiliki lahan milik antara 0,51-0,75 ha ada 4 orang atau 23% dan yang memiliki lahan di atas 0,75 ha tidak ada.

Selain pemilikan rumah dan lahan milik sendiri untuk aset lain seperti ternak tidak dimiliki oleh semua petani mitra. Jenis ternak sapi dimiliki oleh 5 responden kemudian untuk jenis ternak kambing dimiliki oleh 3 responden. Aset jenis ternak ini lebih digunakan sebagai sebuah tabungan atau bentuk infestasi oleh responden untuk berjaga-jaga diwaktu paceklik atauantisipasi kebutuhan mendesak diwaktu mendatang. Aset penting lain seperti motor hampir dimiliki oleh seluruh reesponden yang ada, hanya 2 responden yang tidak memiliki motor. Umumnya motor ini diguakan sebagai alat transportasi responden untuk ke lahan dan bepergian sehari-hari.

Bisa disimpulkan bahwa berdasarkan pemilikan aset yang ada, responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang cukup sama. Berdasarkan pemilikan rumah dan lahan milik yang dapat menjadi sebuah ukuran kekayaan seorang petani, menunjukkan kekayaan petani anggota kemitraan cukup kecil yaitu dengan pemilikan rumah yang sederhana dan luas lahan yang dimiliki semua dibawah 0,75 ha. Meskipun dalam aksesibilitas tidak ada pembatasan terhadap siapapun, petani kaya atau petani miskin tetap saja sebagian besar anggota petani yang ikut kemitraan PKPH adalah petani yang termasuk kategori miskin yang memiliki lahan milik kurang dari 1 ha.

Peneliti juga memperoleh fakta dari beberapa masyarakat desa hutan bukan anggota kemitraan baik penyadap maupun penggarap lahan “Tetelan” bahwa semua anggota masyarakat boleh ikut dalam kemitraan PKPH atau terlibat dalam pengelolaan hutan. Alasan mengapa mereka tidak ikut serta adalah sudah memiliki lahan yang cukup sehingga tidak memiliki waktu dan tenaga untuk bisa amengelola lahan di hutan. Selain itu ada juga yang berhenti mengerjakan lahan hutan karena usia sudah tua, dan tidak sanggup untuk bekerja di lahan yang jauh. Karena umumnya jarak antara pemukiman petani dengan lokasi hutan sekitar 1,5 km dengan jalan yang cukup curam.

#### **5.4.Kesesuaian Implementasi Program PKPH**

Program PKPH diadakan memiliki tujuan, adalah salah satunya untuk menjaga kelestarian hutan. Kelestarian hutan disadari oleh semua orang menjadi begitu penting, karena keberlangsungan hidup manusia di bumi bergantung pada ketersediaan hutan. Oleh karena itu dalam perencanaan dan pelaksanaan program PKPH dibentuk suatu pengaturan yang dapat mencapai tujuan kelestarian hutan tersebut. Adapun dibawah ini hasil dari pengolahan data tentang kesesuaian implementasi program PKPH dari aspek kelestarian hutan.

##### **5.4.1. Kemitraan Penggarap Lahan “Tetelan”**

Dalam kemitraan penggarap “Tetelan”, terdapat kewenangan kepada anggota kemitraan yaitu masyarakat desa hutan untuk menanam tanaman pertanian (berusahatani) di bawah tegakan pohon pinus dengan tetap memperhatikan kelestarian pohon dan hutan secara umum. Memastikan kelestarian pohon dan hutan tanpa adanya sebuah larangan/larangan yang jelas

dapat menyulitkan sampaimana batasan pengelolaan hutan sudah sesuai atau belum. Maka diperlukan sebuah indikator yang dapat mengukur apakah kesesuaian kelestarian telah tercapai atau belum.

Dalam penelitian ini tidak ditemukan panduan secara jelas yang mengatur tentang indikator kesesuaian yang dapat mengukur kelestarian hutan. Meskipun, demikian namun terdapat beberapa hal yang dapat mengukur kelestarian hutan. Indikator ini merupakan hasil dari diskusi peneliti dengan dosen pembimbing serta pihak Perum Perhutani yang diwakili oleh mantri. Setidaknya dalam kemitraan penggarap “Tetelan” terdapat 8 indikator yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur bagaimana tingkat kesesuaian program PKPH dalam mencapai tujuan kelestarian hutan. Adapun dibawah ini Tabel 15. akan menunjukkan hasil pengolahan data tentang kesesuaian implementasi program PKPH berdasarkan kelestarian hutan di Desa Kukur:

Tabel 15. Indikator Kesesuaian Pelaksanaan Program PKPH di Lahan “Tetelan” di Desa Kukur Tahun 2015/2016

No	Indikator	Skor Maksimal	Rata-Rata	Persentase (%)	Kategori
1	Jumlah Pohon	3	2,7	90	Tinggi
2	Kondisi Kanopi	3	2,6	87	Tinggi
3	Jarak Tanam	3	2,9	97	Tinggi
4	Tanaman Petani	3	1,3	43	Rendah
5	Intesitas Penyiangan	3	1,6	53	Sedang
6	Intensitas Pemupukan	3	1,4	47	Rendah
7	Pengolahan Lahan	3	1,4	47	Rendah
8	Kesediaan Tanam Kopi	3	2,0	67	Sedang
	Total	24	15,9	-	Sedang

Sumber: Data Primer, 2016

#### A. Indikator Jumlah Pohon Pinus yang Hidup

Seberapa banyak pohon yang hidup di hutan dapat dijadikan sebagai ukuran sebuah hutan bisa dikatakan lestari atau tidak. Pada kemitraan penggarap “Tetelan”, masyarakatat anggota atau petani mitra bertanggung jawab atas kelangsungan hidup pohon pinus yang ada di dalam lahan “Tetelan”nya. Umumnya pohon pinus yang dibawahnya ditanami tanaman pertanian adalah pinus yang memiliki usia di atas 10 tahun yaitu telah mampu disadap serta telah dilakukan penjarangan. Penjarangan dilakukan oleh Perum Perhutani untuk memilih pohon untuk dibiarkan hidup lalu kondisi pohon yang kurang bagus

biasanya ditebang. Penebangan ini dilakukan setiap lima tahun sekali, yang dimulai sejak pohon berusia 10 tahun.

Dengan telah dilakukannya penjarangan pada pohon pinus akan memungkinkan bagi petani menanam dibawah tegakan karena kepadatan dari pohon berkurang sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tempat menanam tanaman pertanian pada setiap sela pohon. Menurut penjelasan dari mantri setiap umur pinus disetiap plot memiliki jumlah yang disesuaikan. Adapun perhitunganya pada usia 6-10 tahun (belum penjarangan) jumlah pinus hidup adalah 1.333 pohon, kemudian pada usia 11-15 tahun jumlah berkurang menjadi 666 pohon dan di penjarangan terakhir pada usia 16-20 terdapat pohon pinus 333 pohon.

Dari tabel 15. diketahui berdasarkan dari indikator jumlah pohon yang hidup dalam kemitraan PKPH adalah kategori tinggi dimana memiliki persentase terhadap skor maksimal adalah 90%. Dengan rata-rata skor yang dicapai di lapang 2,7 sedangkan skor maksimal yang bisa dicapai adalah 3. Skor tinggi ini tidak bisa sempurna 100% bukan karena ada pencurian atau penjarahan oleh masyarakat desa hutan melainkan beberapa pohon mati karena kebakaran dan terkena bencana angin. Berdasarkan pencocokan keterangan dari pihak Perum Perhutani dengan masyarakat memang saat ini sudah tidak ada praktek pencurian hutan mengingat sanksinya cukup berat. Ketidakberanian masyarakat juga terlihat saat ada pohon pinus hasil penjarangan yang tidak terangkut tetap berada di dalam hutan hingga membusuk.

#### B. Indikator Kondisi Kanopi Pohon Pinus karena Dirempes/Tidak

Pada indikator selanjutnya adalah kondisi kanopi pinus berdasarkan perlakuan perempesan oleh petani kemitraan penggarap "Tetelan". Indikator ini cukup penting dilihat karena terdapat praktek perempesan kanopi pinus oleh petani hingga melebihi batas yang telah ditentukan oleh Perum Perhutani. Perempesan yang dilakukan oleh petani mitra bertujuan untuk mengurangi kanopi agar cahaya matahari bisa masuk ke tanaman pertanian. Selain itu karena semua petani mitra masih menggunakan cara memasak dengan tungku kayu maka ranting hasil perempesan ini juga bisa dijadikan bahan bakar di dapur.

Dari penyajian tabel 15. diketahui berdasarkan kondisi kanopi pohon pinus karena kegiatan perempasan masih menunjukkan bahwa dalam kondisi kategori tinggi yakni memiliki persentase terhadap skor maksimal sebesar 87% dari nilai rata-rata yang dicapai dilapang yaitu sebesar 2,6 sedangkan skor maksimal yang dapat dicapai adalah 3. Dengan demikian meskipun terdapat kegiatan perempasan pohon pinus, kondisi pohon masih tergolong baik karena kurang kondisi kanopi pinus lebih dari 60%.

#### C. Indikator Jarak Tanam Tanaman Pertanian dengan Pohon Pinus

Jarak tanam yang sudah diatur oleh Perum Perhutani untuk dipakai dalam penanaman tanaman pertanian dari pohon pinus adalah minimal 1 m. Meski demikian tidak semua petani mitra menaatinya. Ini disebabkan oleh keinginan petani untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dengan pengoptimalkan lahan hingga menyampingkan risiko rusaknya akar karena terkena cangkul petani yang menanam tanaman terlalu dekat pohon pinus. Apabila akar pohon pinus terluka atau bahkan putus akan mempengaruhi proses penghasilan getah dan juga bisa menyebabkan kematian pada pohon pinus.

Berdasarkan tabel 15. menunjukkan bahwa berdasarkan indikator ketiga yaitu pemakaian jarak tanam antara tanaman pertanian dengan pohon pinus dalam katogori tinggi atau sesuai. Dengan skor maksimal yang dapat dicapai adalah 3, sedangkan haasil rata-rata skor yang dicapai dilapang adalah 2,9 maka didapat persentase yang mendekati sempurna yaitu 97%. Dengan hasil di atas menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa petani melanggar namun persentasenya kecil.

#### D. Indikator Jenis Tanaman yang Saat ini Dibudidayakan

Jenis tanaman yang dibudidayakan oleh petani mitra anggota kemitraan PKPH berkaitan dengan bagaimana pengelolaan yang akan dilakukannya. Pengelolaan yang intensif di lahan hutan kurang sesuai dengan keberadaan fungsi utama sebagai penyaangga kehidupan. Dengan cara bertani yang berlebihan bisa meimbulkan erosi serta pengendapan bahan-bahan kimia kedalam tanah hutan.

Masyarakat desa hutan yang ada di Desa Kucur memiliki pengalaman menanam komoditas hortikultur secara terus menerus. Padahal tanaman hortikultura umumnya membutuhkan penanganan yang intensif. Di lahan hutan yang mereka garap juga ditanami tanaman tersebut. Hal yang kurang sesuai ini

beberapa kali dicoba diubah oleh Perum Perhutani dengan mengajak menanam komoditas yang lebih ramah lingkungan yaitu jenis tanaman obat-obatan atau empon-empon dan kopi.

Berdasarkan tabel 15. maka dapat diketahui bahwa hasil dari pengukuran indikator keempat yaitu dari jenis tanaman yang dibudidayakan di lahan “Tetelan” termasuk dalam kategori rendah atau kurang sesuai. Dari skor maksimal yang dapat diperoleh sebesar 3, rata-rata skor yang dapat dicapai oleh petani mitra hanya 1,3 atau memiliki persentase terhadap skor maksimal sebesar 43% saja.

#### E. Indikator Intensitas Penyiangan di Lahan “Tetelan”

Seberapa besar intensitas penyiangan yang dilakukan petani mitra akan berkaitan dengan kondisi penutup tanah. Hutan yang lestari memiliki karakteristik memiliki penutup tanah yang rapat. Kerapatan penutup tanah ini akan menjaga tanah dari erosi tanah yang bisa menyebabkan hilangnya kesuburan tanah. Dengan responden menanam tanaman pertanian yang membutuhkan perawatan, salah satunya penyiangan gulma menjadi salah satu pertimbangan yang cukup rumit. Dengan mempertimbangkan beberapa aspek baik kelestarian hutan dan tercapainya pendapatan yang layak. Menurut mantri hutan sewajarnya kegiatan penyiangan yang pas adalah sekali dalam sebulan dengan tanpa pemberian obat kimia herbisida.

Diketahui bahwa berdasarkan indikator kelima kesesuaian kelestarian masuk dalam kategori sedang dengan nilai persentase terhadap skor maksimal sebesar 53%. Nilai tersebut diketahui melalui rata-rata skor yang dicapai di lapangan hanya 1,6. Dengan demikian praktek penyiangan yang dilakukan oleh petani anggota kemitraan “Tetelan” perlu dikurangi. Umumnya intensitas penyiangan yang dilakukan oleh petani mitra adalah 2x dalam sebulan.

#### F. Indikator Intensitas Pemupukan

Pemberian pupuk yang berlebihan juga memiliki dampak yang kurang baik pada kesehatan tanah yang ada di hutan. Sama seperti halnya dengan intensitas penyiangan, menurut mantri hutan pemupukan yang dianggap wajar adalah sekali saja, baik itu pupuk kimia maupun pupuk organik.

Mengacu pada tabel 15. dapat diketahui bahwa berdasarkan intensitas pemberian pupuk menunjukkan hasil kesesuaian kelestarian hutan kurang sesuai

karena berada dalam kategori rendah. Dengan nilai persentase terhadap skor maksimal hanya 47% yang memiliki rata-rata skor dilapang sebesar 1,4. Dalam praktek lapang biasanya pemupukan yang dilakukan oleh petani adalah 2 kali dalam sebulan bahkan pada komoditas cabai keriting bisa satu bulan 4x.

Kebiasaan kurang baik masyarakat Desa Kucur yang mengerjakan lahan “Tetelan” adalah memberi pupuk organik berupa kotoran ayam disetiap awal musim tanam. Setelah pemberian pupuk organik tersebut setelah terdapat tanaman pun juga masih diberi pupuk kimia. Pemberian pupuk ini juga menjadi koreksi dari Perum Perhutani, karena dengan pemberian pupuk tersebut membuat daun pohon pinus menguning.

#### G. Indikator Intensitas Pengolahan Lahan

Pengolahan lahan merupakan salah satu indikator untuk melihat seberapa besar pengolahan lahan hutan yang seharusnya tidak diolah terlalu sering. Menurut mantri hutan dalam sekali musim pengolahan yang memperhatikan kelestarian yang hanya dilakukan 1 pengolahan saja.

Berdasarkan Tabel 15, dapat diketahui berdasarkan indikator intensitas pengolahan lahan, program PKPH belum sesuai karena hasil yang diperoleh berada dalam kategori rendah. Dengan persentase terhadap skor maksimal hanya 47% yang mana nilai rata-rata skor yang dicapai sebesar 1,4 saja. Pengolahan yang dilakukan dalam 1 tahun oleh masyarakat Desa Kucur umumnya sebanyak 3x. Pengolahan pertama biasanya diawal tanam ditanami oleh tanaman bunga kol, dan bawang merah. Setelah tanaman pertama mulai tumbuh kemudian lahan tersebut ditanami oleh tanaman cabai, terong, kacang dan jenis tanaman lain. Setelah tanaman pertama panen kemudian sisa panen dibersihkan dengan tujuan tidak mengganggu tanaman yang lainnya yang masih hidup. Lalu setelah tanaman cabai, terong dan tanaman lainnya mulai panen, petani akan menanam tanaman jagung dibawahnya.

#### H. Kesiediaan Mengganti Komoditas Horti menjadi Kopi

Indikator terakhir adalah kesiediaan petani mitra untuk mengganti tanaman hortikultura ke tanaman kopi. Berdasarkan penjelasan indikator di atas bila tanaman hortikultura diganti dengan tanaman kopi maka akan meningkatkan nilai

kesesuaian berdasarkan kelestarian. Ini dikarenakan pada tanaman kopi sesuai dengan kelestarian hutan.

Dengan melihat Tabel 15. dapat diketahui jika berdasarkan indikator kesediaan berganti komoditas kopi menunjukkan hasil yang cukup karena termasuk dalam kategori sedang. Dengan nilai presentase terhadap skor maksimal sebesar 63% atau memiliki rata-rata skor yang dicapai dilapang sebesar 1,9. Saat ini yang telah berganti komoditas kopi cukup banyak, dan sepertinya akan terus bertambah karena salah satu anggota telah berhasil menanam kopi dengan hasil yang cukup memuaskan.

Penjelasan yang ada di atas merupakan penjelasan dari indikator yang dibahas berdasarkan tiap satuan indikator. Namun secara keseluruhan untuk menilai pelaksanaan program PKPH secara penuh berdasar seluruh indikator secara bersama-sama hasilnya adalah tergolong sedang. Dimana dari hasil skor yang diperoleh dari semua indikator memiliki jumlah 472 dengan keseluruhan responden adalah 30. Dengan demikian rata-rata skor tiap responden adalah sebesar 15,86 berada pada daerah sedang yang dimulai oleh nilai 13,34 hingga 18,66.

Meskipun dari hasil skoring menunjukkan kesesuaian implementasi berdasarkan kelestarian hutan berada di kategori sedang namun secara keseluruhan semua petani memiliki persepsi yang baik terhadap seluruh kebijakan Perum Perhutani. Semua petani mitra menyadari bahwa kelestarian hutan sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka dan mereka merasa perlu untuk terus menjaga kelestarian hutan. Selain itu semua responden juga mengakui beberapa praktik-praktik kurang baik yang menjadi penghambat kelestarian hutan masih dilakukan oleh responden itu sendiri. Alasan yang digunakan oleh hampir semua responden untuk tetap menganggap wajar praktik kurang baik tersebut adalah tuntutan kondisi serta melihat praktik yang sama oleh teman/tetangganya.

#### **5.4.2. Kemitraan Penyadap Getah Pinus**

Dalam kemitraan penyadap getah pinus tidak terdapat indikator yang khusus sebagai ukuran telah sesuai atau belumnya pelaksanaan berdasarkan kelestarian hutan. Kegiatan dalam penyadapan tidak terlalu mengandung resiko kerusakan hutan. selain itu setiap penyadap juga telah memahami bagaimana

menyadap yang baik agar pohon pinus bisa tetap lestari. Pelaksanaan penyadapan oleh petani penyadap sudah sesuai aturan dasar utamanya dalam tetap menjaga kesehatan pohon pinus meskipun ada beberapa cara tidak mengikuti ketentuan dari mantri hutan.

Tidak ikut ketentuan yang dimaksud salah satunya adalah saat menggunakan metode pembuatan koakan pada tanaman pinus. Dari pihak mantri mengarahkan cara pembuatan koakan dalam 1 pohon pinus adalah sebanyak 4. Namun responden penyadap di Desa Kucur hanya membuat 1 hingga 2 Koakan saja. Masing-masing memiliki alasan yang baik dan masuk akal. Cara pembuatan koakan yang langsung dimaksudkan oleh Perum Perhutani agar getah yang dihasilkan oleh 1 pohon lebih cepat dan banyak. Sedangkan alasan dari penyadap hanya membuat koakan sebanyak 1-2 adalah untuk menjaga kondisi pohon tidak roboh dan menghemat getah yang keluar dari pinus. Masing-masing alasan tersebut tidak terlalu berpengaruh pada keletarian hutan utamaanya pohon pinus karena masing-masing pihak telah menganggap kelestariaan pohon begitu penting.

## **5.5. Analisis Pendapatan Petani dalam Kemitraan PKPH**

### **5.5.1. Analisis Pendapatan Usahatani dalam Kemitraan Penggarap Lahan “Tetelan”**

#### **A. Jenis Komoditas di Lahan “Tetelan”**

Umumnya petani anggota menanam tanaman hortikultura yang memakai sistem tumpang sari. Adapun di bawah ini Tabel 16. tentang komoditas dan jumlah petani yang membudidayakannya.

Tabel 16. Komoditas dan Jumlah Petani Mitra yang membudidayakannya di Lahan “Tetelan” Desa Kucur 2015/2016

No	Komoditas	Petani (orang)
1	Jagung	27
2	Cabai Keriting	18
3	Cabai Rawit	18
4	Jahe	17
5	Kopi	15
6	Buncis	10
7	Kacang Tanah	8
8	Terong	7
9	Bunga Kol	7
10	Bawang Merah	3
11	Cabai Besar	3

Sumber: Data Primer, 2016

Kombinasi tanaman yang dibudidayakan setiap petani sangat beragam dan sulit dikategorikan. Meskipun kombinasinya sulit dikelompokkan namun dari 30 petani responden yang diambil terdapat 11 tanaman yang dibudidayakan di lahan “Tetelan” selama satu musim tanam. Berdasarkan Tabel 16. di atas dapat diketahui bahwa komoditas jagung merupakan tanaman yang hampir di tanam oleh semua petani “Tetelan” yaitu 27 petani. Kemudian komoditas lain yang juga banyak ditanam adalah cabai keriting dan cabai rawit masing-masing 18 petani, lalu ada komoditas jahe 17 petani serta tanaman kopi 16 petani. Tanaman lain yang biasanya dijadikan tanaman pendamping atau tambahan tumpang sari adalah buncis, kacang tanah, bunga kol bawang merah dan cabai besar. Data lebih detail akan disajikan di Lampiran 4.

Umumnya petani dalam satu kali musim tanam di lahan “Tetelan” dimulai pada Bulan Desember hingga Bulan Agustus (8 bulan) dan memiliki kombinasi dua hingga tujuh tanaman. Dalam aplikasinya ada yang ditanam secara langsung juga ada yang diatur secara petak-petak kecil monokultur. Setiap petani memiliki alasan masing-masing dalam memilih kombinasi tersebut namun sebagian besar alasannya adalah kebiasaan tahunan dan ikut-ikutan tetangga atau petani lain. Setiap tahun umumnya petani memilih tanaman yang sama untuk dibudidayakan. Selain itu beberapa petani mitra juga menyampaikan bahwa jika tanaman yang ditanam oleh semua petani sama maka menunjukkan kerukunan warga desa.

### **B. Biaya Usahatani di Lahan “Tetelan”**

Biaya usahatani lahan “Tetelan” terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Adapun dibawah ini, akan ditunjukkan oleh Tabel 17. tentang rata-rata total biaya usahatani di lahan “Tetelan”.

Tabel 17. Rata-rata Total Biaya Usahatani per Ha Petani Mitra Penggarap Lahan “Tetelan” di Desa Kucur, 2015/2016

No	Macam Biaya	Jumlah/ha (Rp)	Persentase (%)
1	Biaya Tetap	1.816.389	14,9
2	Biaya Variabl	10.322.368	85,1
	Total	12.208.757	100,0

Sumber: Data Primer, 2016

Dari Tabel 17. di atas dapat diketahui jika rata-rata total biaya dalam usahatani di lahan “Tetelan” oleh petani mitra adalah sebesar Rp12.208.757,00. Hasil tersebut merupakan penjumlahan dari rata-rata total biaya tetap sebesar

Rp1.816.389,00 dan rata-rata total biaya variabel sebesar Rp10.322.757,00. Dapat disimpulkan juga bahwa biaya variabel memiliki kontribusi paling besar dalam menentukan nilai total biaya yaitu sebesar 85,1% sedangkan kontribusi biaya tetap cukup kecil yaitu hanya 14,9%. Rincian masing-masing biaya akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya.

Biaya tetap usahatani di lahan “Tetelan” hanya terdiri dari biaya iuran anggota kemitraan “Tetelan” yang tidak ikut kemitraan penyadap getah pinus serta biaya penyusutan untuk perlengkapan “lanjaran” atau ajir untuk penegak tanaman. Adapun dibawah ini Tabel 18. akan memeperlihatkan rata-rata pengeluaran tetap petani untuk kegiatan usahatani di lahan “Tetelan” :

Tabel 18. Rata-rata Biaya Tetap Usahatani per Ha Petani Mitra Penggarap Lahan “Tetelan” di Desa Kucur, 2016

No	Macam Biaya Tetap	Jumlah/ha (Rp)	Persentase (%)
1	Penyusutan Peralatan Ajir	1.713.333	94,3
2	Iuran untuk Sadapan	103.056	5,7
Total		1.816.389	100,0

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan Tabel 18. dapat diketahui bahwa rata-rata total biaya tetap tiap hektar di lahan “Tetelan” adalah sebesar Rp1.816.389,00 yang didapat dari penjumlahan biaya penyusutan pengeluaran peralatan ajir sebesar Rp1.713.333,00 atau 94,3% dari total biaya tetap dan dari biaya iuran untuk sadapan sebesar Rp 103.056,00 atau 5,7% dari total biaya tetap.

Pada biaya penyusutan peralatan ajir sebesar Rp1.713.333,00 merupakan hasil dari perhitungan harga ajir yang umumnya di beli petani mitra dengan harga rata-rata Rp517,-/batang. Setiap petani mitra pada lahan 1 ha rata-rata membutuhkan 9.717 batang yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah tanaman yang mereka tanam. Setelah harga satuan batang ajir dengan jumlah keseluruhan kebutuhan ajir dikalikan lalu didapatkan harga pembelian ajir. Ajir yang dipakai petani mitra dapat digunakan selama 3 kali musim tanam sehingga pada perhitungan penyusutannya dari perkalian harga perbatang dan total ajir kemudian dibagi 3. Selain dengan membeli ajir jadi ada juga petani yang memilih untuk membuat ajir sendiri dengan membeli bambu utuh kemudian mereka potong dan buat sendiri, ada juga cara lain yang digunakan petani mitra untuk lebih menghemat pengeluaran dengan cara mencari batang-batang jenis semak di hutan.

Biaya tetap yang lain adalah biaya tetap yang hanya dikeluarkan oleh petani mitra yang mengikuti kemitraan “Tetelan” tapi tidak mengikuti kemitraan penyadap getah pinus. Rata-rata nominal yang harus dibayarkan setiap petani mitra tersebut tiap ha adalah Rp103.056,00. Penarikan ini biasanya dilakukan di akhir musim tanam yang dikumpulkan oleh anggota petani yang ditunjuk biasanya adalah ketua kelompok tani “Tetelan”. Setelah terkumpul uang iuran tersebut akan disetor ke Mantri yang kemudian akan dikembalikan lagi kepada anggota kelompok kemitraan sadapan dalam bentuk peralatan sadapan. Bagi petani yang mengikuti kemitraan “Tetelan” dan sadapan akan dapat lebih menghemat biaya tetap sebesar biaya iuran sadapan karena tidak perlu mengeluarkan pengeluaran tersebut. Pengeluaran biaya variabel pada usahatani di lahan “Tetelan” bisa dilihat pada Tabel 19. di bawah ini :

Tabel 19. Rata-rata Biaya Variabel Usahatani per Ha Petani Mitra Penggarap Lahan “Tetelan” di Desa Kucur, 2016

No	Macam Biaya	Jumlah/ha (Rp)	Persentase (%)
1	Benih	2.477.511	24,0
2	Pupuk	3.760.917	36,4
3	Pestisida	1.517.600	14,7
4	Tenaga Kerja	2.465.917	23,9
5	Polibag	100.423	1,0
	Total	10.322.368	100,0

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan Tabel 19. di atas dapat diketahui bahwa rata-rata total biaya variabel yang dikeluarkan oleh petani mitra adalah Rp 10.322.368,00. Total biaya tersebut terbagi menjadi beberapa biaya lagi seperti biaya benih sebesar Rp2.477.511,00 atau memiliki proporsi 24,0%, kemudian biaya pupuk dengan proporsi terbesar yaitu 36,4% dengan nilai Rp3.760.917,00, biaya pestisida sebesar Rp1.517.600,00 atau 14,7%, Biaya tenaga kerja sebesar Rp2.465.917,00 atau 23,9% dan biaya terakhir dengan proporsi paling kecil yaitu biaya polibag sebesar Rp100.423,00 atau hanya 1,0% dari total biaya tenaga kerja.

Berbeda dengan biaya variabel usahatani komoditas jenis cabai di lahan biasa, di lahan “Tetelan” tidak boleh menggunakan mulsa karena akan mengganggu kelestarian hutan. Dengan demikian pada usahatani di lahan “Tetelan” tidak perlu mengeluarkan biaya pembelian mulsa. Meskipun demikian biaya mulsa yang memang tidak ada akan tetap dikeluarkan di biaya tenaga kerja

penyiangan untuk tetap menjalankan fungsi mulsa yang salah satunya sebagai pengendali gulma.

Dalam biaya benih yang memiliki proporsi 24,0% dari total biaya variabel terdiri dari pengeluaran atas pembelian benih oleh petani mitra. Dari beberapa komoditas yang ditanam, petani mitra di Desa Kucur belum sepenuhnya menggunakan benih hibrida. Pemakaian benih hibrida hanya dilakukan untuk jenis tanaman cabai keriting, cabai besar, buncis, bunga kol, terong. Benih hibrida yang ditanam oleh petani biasanya dibeli dari toko pertanian yang ada di kawasan Desa Kucur. Sedangkan benih komoditas yang lain seperti kacang, bawang merah, jahe dan jagung petani menggunakan benih turunan yang telah lebih dari 2 turunan. Benih ini biasanya di dapat beli di toko kelontong yang bukan menjual benih tapi menjual hasil yang peruntukannya untuk dikonsumsi, atau terkadang juga membeli dari panen petani lain atau tetangga. Hal ini sebenarnya kurang sesuai dengan anjuran pertanian untuk menggunakan benih unggul untuk menjaga produksi tanaman. Berbeda dengan benih atau bibit lain, pada tanaman kopi yang mulai ditanam oleh petani “Tetelan” di dapat dengan gratis. Benih/bibit ini bisa didapat gratis yaitu dengan mencari anakan kopi yang ada di kebun-kebun kerabat petani tersebut yang lebih dulu menanam kopi.

Biaya pupuk dalam usahatani lahan “Tetelan” termasuk dalam katogori yang cukup besar yaitu dengan proporsi 36,4% dari total biaya variabel. Jenis pupuk yang dipakai oleh petani mitra terdiri dari pupuk kimia dan pupuk organik. Pupuk kimia yang umum dipakai oleh petani mitra adalah pupuk NPK(Phonska), NPK(Cap Mutiara), Urea, dan ZA. Sedangkan pupuk organik yang dipakai adalah pupuk kandang ayam, kandang sapi maupun kandang kambing. Dalam pemakaiannya pupuk kimia oleh petani mitra diberikan sesuai umur tanaman dan jenis tanaaman. Sedangkan untuk pupuk kandang digunakan sebagai pupuk dasar yang diberikan saat proses pengolahan tanah diawal musim tanam.

Pengeluaran petani untuk biaya pestisida meliputi pembelian obat untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan gulma. Dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp1.517.600,00 tiap petani mitra ini, obat yang sering digunakan adalah jenis Antila, Aurora, Amistartop, Antracol, dan Daconil sebagai Fungisida. Kemudian Kalikron, Asmek dan Tornado sebagai Insektisida

lalu ada Winder sebagai Bakterisida serta Gramason sebagai Herbisida. Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa pemakaian obat terbesar adalah pada jenis fungisida. Petani mitra menuturkan bahwa mereka mengeluhkan penyakit "jebuk" yang disebabkan oleh jenis jamur tanah. Penyakit ini menyebabkan tanaman tidak bisa tumbuh secara normal, ciri-ciri tanaman yang terjangkit adalah pada bagian ujung tunas menjadi keriting dan tidak bisa tumbuh besar.

Biaya variabel selanjutnya adalah biaya tenaga kerja (TK) yang meliputi biaya TK pengolahan tanah, TK persemaian, TK pemupukan, TK Pengendalian OPT dan TK pemanenan. Dalam kegiatan usahatani di lahan "Tetelan" ini hampir semua petani mitra mengerjakan semua pekerjaannya dilakukan sendiri dan dibantu tenaga dalam keluarga atau dengan kata lain tidak menggunakan jasa buruh tani. Kalaupun petani mitra menggunakan tenaga buruh itu hanya pada kegiatan pengolahan tanah, penyiangan serta pemanenan saja. Karena beberapa dari petani mitra melakukan kegiatan usahatannya secara sendiri maka terkadang hingga berbulan-bulan seperti dalam kegiatan pengolahan lahan yang umumnya dilakukan selama 1 bulan. Selain itu masih ada hubungan yang harmonis antar petani yaitu saling tolong-menolong tanpa ada sistem upah, namun sistem ini hanya berlaku pada petani yang masih memiliki kekerabatan keluarga ataupun terkadang karena sudah sangat dekat. Dengan jumlah total biaya sebesar Rp2.465.917,00 dari biaya TK ini adalah biaya yang dikeluarkan secara riil untuk buruh tani yang membantu kegiatan petani mitra saja.

Biaya terakhir dalam biaya variabel usahatani di lahan "Tetelan" adalah biaya pembelian polibag. Polibag ini digunakan oleh petani mitra yang menanam komoditi jenis cabai yaitu untuk membuat persemaian tanaman cabai besar dan cabai keriting saja. Sedangkan untuk komoditi yang lain petani mitra tidak menggunakan metode persemaian. Cara yang digunakan petani mitra adalah langsung menanam benih pada lubang tanam yang sudah di buat di tanah lahan "Tetelan" mereka. Rata-rata jumlah setiap petani mitra dalam tiap hektar lahan membutuhkan 14 pack untuk membuat persemaian. Kemudian harga setiap pack-nya antara Rp5.000,00 hingga Rp 8.000,00 yang dibedakan berdasarkan merk dan toko tempat membeli yang menentukan harganya. Namun data yang diperoleh

dari petani mitra dapat diketahui bahwa rata-rata harga setiap pack-nya adalah Rp6.816,00.

### C. Penerimaan Usahatani

Terdapat 11 komoditas yang ditanam oleh petani mitra yang masing-masing petani mitra memiliki kombinasi yang berbeda-beda. Umumnya setiap petani memiliki kombinasi 2 hingga 7 tanaman disetiap lahanya. Besar kecilnya penerimaan yang diperoleh masing-masing petani mitra tergantung dari kombinasi yang telah mereka pilih. Berikut hasil penerimaan tersebut akan ditunjukkan oleh Tabel 20. tentang rata-rata penerimaan setiap komoditas/ha setiap petani mitra:

Tabel 20. Rata-rata Penerimaan Usahatani Setiap Komoditas per Ha per Petani Mitra Penggarap Lahan “Tetelan” di Desa Kukur,2015/ 2016

No	Komoditas	Jumlah/ha (Rp)
1	Cabai Besar	2.017.586
2	Cabai Keriting	9.047.133
3	Cabai Rawit	4.122.633
4	Jagung	1.730.222
5	Terong	926.075
6	Jahe	5.698.700
7	Bunga Kol	78.333
8	Kacang Tanah	1.073.100
9	Bawang Merah	858.966
10	Buncis	626.600
11	Kopi	286.400
Total		26.369.864

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 20. dapat diketahui bahwa rata-rata setiap petani memperoleh penerimaan dari kombinasi komoditas yang mereka usahakan dalam 1 musim tanam adalah sebesar Rp26.396.864,00. Penerimaan tersebut merupakan hasil dari seluruh total produksi komoditas dikali dengan harga komoditas masing-masing kemudian dibagi oleh seluruh jumlah petani mitra yaitu sebesar 30 orang. Dari hasil analisis data yang dapat dilihat di bagian lampiran, ditunjukkan bahwa dari 30 petani mitra memiliki penerimaan yang cukup rata. Terdapat nilai penerimaan minimal sebesar Rp0,- yang dialami oleh 1 petani mitra karena komoditas kopi yang petani tersebut budidayakan belum panen. Namun 29 petani mitra yang lain memiliki nilai penerimaan antara Rp12.686.000,00 hingga Rp40.814.000,00.

Masing-masing komoditas yang ditanam oleh petani mitra di atas memiliki nilai penerimaan yang berbeda-beda, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Untuk melihat hal tersebut bisa dilihat dari nilai rata-rata produktitas hasil setiap komoditas dikalikan dengan harga rata-rata produksi komoditas tanpa dibagi seluruh petani mitra. Adapun hasilnya akan ditunjukkan oleh Tabel 21. berikut ini:

Tabel 21. Rata-rata Penerimaan Usahatani Setiap Komoditas per Ha di Lahan “Tetelan” Berdasarkan Produktivitas di Desa Kucur, 2016

No	Macam Biaya	Jumlah/petani (Rp)	Persentase (%)
1	Cabai Besar	19.448.464	24,0
2	Cabai Keriting	15.205.740	18,8
3	Cabai Rawit	7.670.745	9,5
4	Jagung	2.255.530	2,8
5	Terong	4.035.828	5,0
6	Jahe	9.149.396	11,3
7	Bunga Kol	337.857	0,4
8	Kacang Tanah	4.067.004	5,0
9	Bawang Merah	8.313.190	10,3
10	Buncis	1.907.139	2,4
11	Kopi	8.592.190	10,6
	Total	80.982.892	100,0

Sumber: Data Primer, 2016

Dari apa yang ditampilkan oleh Tabel 21. di atas dapat diketahui bahwa dari 11 komoditas yang ditanam menunjukkan komoditas cabai besar merupakan tanaman yang memiliki nilai penerimaan paling besar, yang kemudian diikuti oleh komoditas cabai keriting, jahe, kopi, bawang merah, cabai rawit, terong dan kacang tanah kemudian jagung buncis dan bunga kol.

Pada komoditas yang memiliki beberapa kali pemanenan berdasarkan hasil pengolahan data atau di lampiran 7. dapat diketahui jika cabai besar rata-rata dapat dipanen selama 8 kali pemanenan, sedangkan pada komoditas cabai keriting rata-rata dapat dipanen selama 8 kali meski begitu ada beberapa cabai milik petani mitra mampu mencapai panen hingga 10 kali. Kemudian pada komoditas cabai rawit dan terong rata-rata mampu dipanen hingga 10 kali. Sedangkan untuk komoditas buncis rata-rata dapat dipanen sebanyak 6 kali, komoditas kopi dapat dipanen semalaman 2 kali. Kemudian untuk komoditas lainnya jagung, kacang tanah, bunga kol dan jahe dapat dipanen sekali saja.

Jika pada tabel 21. di atas merupakan rata-rata penerimaan usahatani di lahan hutan berdasarkan produktivitas dialikan dengan harga tiap satuan kilogram

komoditas. Dibawah ini pada Tabel 22. akan di tunjukan mengenai rata-rata hasil produksi/hektar dan rata-rata harga setiap satuan dari 11 komoditas yang dibudidayakan oleh petani mitra di lahan “Tetelan”. Yaitu, sebagai berikut:

Tabel 22. Rata-rata Produktivitas dan Harga Setiap Komiditas per Ha Petani Mitra Lahan “Tetelan” di Desa Kucur, 2016

No	Macam Biaya	Produktivitas (kg)/ha	Harga (Rp)/kg
1	Cabai Besar	1.499	13.367
2	Cabai Keriting	1.279	12.198
3	Cabai Rawit	690	10.829
4	Jagung	499	4.523
5	Terong	1.459	2.709
6	Jahe	1.969	4.647
7	Bunga Kol	614	550
8	Kacang Tanah	863	4.714
9	Bawang Merah	430	19.333
10	Buncis	555	3.536
11	Kopi	346	24.500

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 22. diketahui bahwa komoditas yang paling tidak menguntungkan pada musim tanam usahatani 2016 adalah bunga kol. Kerugian tersebut disebabkan oleh harga pasar yang jatuh dan hanya mencapai Rp550,00. Petani mitra juga menyampaikan bahwa harga normal biasanya untuk komoditas bunga kol/kg adalah sekitar Rp2.500,00 hingga Rp 4.000,00. Bahkan karena harga yang sangat murah, hasil panen bunga kol banyak yang tidak dipanen karena tidak ada pedagang yang mengambil dan tidak mampuu mengganti ongkos panen. Kemudian komoditas lain yang mendapat perhatian paling besar oleh petani mitra adalah komoditas jenis cabai besar dan cabai besar. Petani mitra mengatakan bahwa pada musim tanam 2016 ini produksi tanaman cabai tersebut sangat rendah jika dibandingkan pada musim tanam sebelumnya yang bisa mencapai 2x lipat produksi tahun ini. Sebagian besar petani mitra berpendapat bahwa turunya produksi disebabkan oleh cuaca di tahun 2016 yang dianggap tidak seperti cuaca pada tahun sebelumnya. Sedangkan pada komoditas yang lain dianggap stabil dan tidak begitu berbeda dengan musim-musim tanam sebelumnya.

Khusus pada komoditas kopi yang merupakan tanaman baru bagi petani mitra, ternyata dianggap cukup memiliki hasil yang cukup tinggi oleh petani mitra. Dari seluruh petani penggarap lahan “Tetelan” yang sudah menanam

komoditas kopi hanya ada satu petani saja yang sudah panen dan merupakan panen pertama kali. Dari hasil produksi panen dan harga pertama tersebut, dianggap menguntungkan oleh petani mitra yang lain. Setelah melihat hasil produksi kopi dan harganya cukup tinggi banyak anggota lain yang sebelumnya tidak berniat menanam kopi akhirnya ikut tertarik menanam kopi.

#### **D. Pendapatan Usahatani di Lahan “Tetelan”**

Adapun di bawah ini pada Tabel 23. akan ditunjukkan bagaimana rata-rata pendapatan dari 11 komoditas yang di masing-masing telah dikombinasikan oleh petani mitra yang ada di lahan “Tetelan”.

Tabel 23. Rata-rata Pendapatan Usahatani per Ha per Petani mitra di Lahan “Tetelan” di Desa Kucur, 2016

No	Uraian	Jumlah/ha (Rp)
1	Total Biaya	12.208.757
2	Biaya Tetap	1.816.389
3	Biaya Variabel	10.322.368
4	Penerimaan	26.369.864
5	Pendapatan	14.161.137

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan Tabel 23. dapat diketahui bahwa total pendapatan petani mitra per hektar sebesar Rp14.161.137,00. Hasil pendapatan sebesar ini didapat oleh petani mitra dalam sekali musim tanam selama 8 bulan yaitu dimulai pada Bulan Desember hingga Bulan Juli. Maka jika dihitung rata-rata pendapatan petani mitra per ha dalam satu bulan adalah sebesar Rp1.770.158,00. Dengan rata-rata petani hutan memiliki lahan  $\frac{1}{4}$  ha, maka dapat diketahui juga setiap petani mitra penggarap lahan “Tetelan” tersebut memperoleh pendapatan sebesar Rp442.539,00. Pendapatan tersebut oleh petani mitra dianggap kecil, karena pada musim-musim sebelumnya mereka mampu memperoleh pendapatan yang lebih besar.

#### **5.5.2. Analisis Pendapatan Petani dalam Kemitraan Penyadap Getah Pinus**

Dalam menganalisis pendapatan usahatani petani mitra anggota kemitraan berbeda dengan cara menganalisis pendapatan usahatani pada kemitraan penggarap lahan “Tetelan”. Pada analisis pendapatan usahatani petani anggota kemitraan lebih mudah karena pada kemitraan ini memiliki kesamaan dengan cara sistem penghitungan jenis pekerjaan buruh yaitu dihitung berdasarkan jumlah getah yang di dapat oleh petani.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika dari keseluruhan petani anggota kemitraan penyadap getah pinus sebanyak 22 orang ini dalam setahun hanya mampu menghasilkan 14,5 ton atau 14500 kg getah pinus. Satu tahun dalam kegiatan musim sadapan hanya berlangsung selama 8 bulan saja yaitu dimulai sejak bulan Mei sampai dengan Bulan Desember. Dari informasi tersebut dapat diketahui juga bahwa dalam setahun rata-rata petani hanya mampu menyadap getah sebesar 660 kg. Dengan harga Rp3.000,00/kg maka dapat diketahui juga bahwa rata-rata setiap petani dalam kurun waktu 8 bulan mendapat pendapatan sebesar Rp1.980.000,00.

Hasil sadapan rata-rata tiap petani penyadap di atas, yaitu 660 kg ini didapatkan penyadap selama 8 bulan atau 16 kali periode penimbangan. Jika rata-rata tersebut dibagi menjadi 16 kali periode dapat diketahui jika setiap periode penyadap hanya mampu menghasilkan 41,25 kg dengan nilai Rp123.750,00 jika diungkan setiap 15 hari sekali atau pendapatan dalam sebulan sebesar Rp247.500,00. Sistem kerja penyadap di Desa Kucur berdasarkan hasil penelitian hanya dilakukan pagi hingga siang hari yaitu dimulai pukul 06.00 hingga pukul 12.00 atau 6 jam saja. Di dalam satu minggu penyadap juga umumnya hanya menggunakan 3 hari waktunya untuk bekerja sebagai penyadap. Terkadang anggota penyadap ini juga menyesuaikan hari kerja di sadapan dengan kegiatan lainnya utamanya kegiatan pertanian di lahan baik milik sendiri maupun di "Tetelan". Semua anggota penyadap ini selalu mendahulukan kepentingan kegiatan yang berkaitan dengan pertanian.

Pada bulan-bulan yang juga bulan termasuk dalam bulan musim tanam seperti Bulan Mei, Juni, November dan Desember jumlah hasil sadapan setiap penyadap akan lebih kecil. Sedangkan pada Bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober hasil sadapan penyadap akan relatif cukup banyak hingga masing-masing penyadap umumnya mampu menyadapa 2,5 kwintal atau 250 kg. Hasil pada bulan tersebut tinggi selain disebabkan oleh sedikitnya gangguan dari kegiatan pertanian juga disebabkan oleh suhu yang cukup panas sehingga mempercepat aliran getah.

Pendapatan per bulan dari kemitraan ini lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan kemitraan penggarap "Tetelan" yang mencapai Rp442.540,00 tiap bulan. Pendapatan dari kedua kemitraan tersebut cukup jauh. Dimana nilai

pendapatan penggarap lahan “Tetelan” hampir 2x lipat dari nilai pendapatan penyadap lahan “Tetelan”. Berdasarkan hasil penelitian perbedaan ini disebabkan oleh kebiasaan petani anggota saja yang memang tidak begitu menyukai pekerjaan menyadap getah pinus. Hal tersebut diakui sendiri oleh beberapa petani penyadap, mereka sebenarnya juga mengetahui jika apabila pekerjaan menyadap sangat menguntungkan jika dilakukan dengan rutin. Selain tidak memerlukan modal hasilnya juga sangat tinggi. Peneliti sempat mewawancarai seorang penyadap getah yang memang fokus bekerja sebagai penyadap getah pinus di Desa Selorejo. Dari hasil wawancara tersebut diketahui jika dalam satu bulan penyadap tersebut rutin, penyadap tersebut mampu menyadap getah sekitar 1 ton atau 1000 kg. Dengan demikian dapat diketahui juga bahwa pendapatan yang diperoleh penyadap tersebut adalah Rp3.000.000,00.

Pendapatan penyadap tersebut merupakan pendapatan yang cukup besar. Nilai nominalnya bisa jauh lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan yang di dapat dari kemitraan penggarap lahan “Tetelan” yang jika dibagi tiap bulannya hanya sekitara Rp442.540,00. Besarnya pendapatan penyadap rutin tersebut sebenarnya juga sudah diketahui oleh para petani kemitraan “Tetelan” dan bahkan diketahui oleh petani anggota penyadap getah pinus. Namun tetap saja sebagian besar anggota masyarakat tidak tertarik untuk ikut menjadi penyadap rutin seperti yang ada di Desa Selorejo.

Alasan utama yang mendasari hal tersebut adalah kepuasan hati dari masing-masing petani mitra. Semua petani mitra merasa lebih puas jika memiliki tanaman atau bila bercocok tanam meski mereka juga memahami bahwa dalam kegiatan usahatani di lahan “Tetelan” lebih memiliki risiko kerugian yang lebih besar.dibanding dengan mengikuti kegiatan penyadapan. Petani mitra menganggap bahwa pekerjaan utama mereka adalah petani yang bercocok tanam, sedangkan kegiatan penyadapan adalah kegiatan tambahan untuk menambah pemasukan terutama pada saat lahan pertanian mereka tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Sebagian dari anggota petani mitra memilih pekerjaan sampingan sebagai penyadap karena sudah tua dan tidak memiliki tenaga yang besar untuk bekerja sebagai buruh tani. Karena petani mitra tersebut sudah tidak percaya diri atau merasa malu menjadi seorang buruh, mereka menganggap bahwa

saat ini mereka sudah lambat di dalam bekerja. Hal inilah yang membuat rata-rata anggota penyadap di Desa Kucur adalah mereka petani yang sudah tua.

Petani yang memiliki umur lebih muda lebih memilih mencari pekerjaan sampingan menjadi buruh baik itu buruh tani, buruh kuli batu, buruh kuli bangunan karena. Alasan yang mendasari pilihan mereka ini adalah pada jenis pekerjaan buruh upah yang mereka dapatkan itu pasti yaitu setiap kerja setengah hari upah yang akan mereka dapatkan sudah pasti hasilnya. Selain itu kapan hasilnya diambil lebih cepat. Sedangkan pada kegiatan penyadapan besar kecilnya pendapatan sangat ditentukan dengan ketekunan dari penyadap tersebut. Jika penyadap tersebut rajin dan rutin maka hasil yang didapat akan besar dan sebaliknya. Alasan lainya juga dikarenakan masa pembayaran atau pencairan pendapatan mereka membutuhkan waktu yang lama yaitu 15 hari sekali. Dengan masa pencairan yang lama ini membuat penyadap mengalami kesulitan keuangan, karena kebutuhan uang digunakan setiap hari.



## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang pola kemitraan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan, studi kasus program PKPH di Desa Kucur dapat disimpulkan bahwa:

1. Program Pola Kemitraan Pengelola Hutan (PKPH) dijalankan oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan Desa Kucur dengan berlandaskan kesepakatan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Isi perjanjian tersebut adalah wujud dari pengelolaan hutan yang berprinsip pada kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Dalam pelaksanaan di lapang, berdasarkan aksesibilitas masyarakat desa hutan untuk ikut dalam pengelolaan hutan dilaksanakan secara adil dan terbuka. Seluruh anggota masyarakat desa hutan dapat ikut terlibat dalam proram PKPH asalkan mau mentaati perjanjian yang telah disepakati bersama.
2. Tingkat kesesuaian implementasi program PKPH di Desa Kucur berdasarkan kelestarian hutan pada kemitraan penggarap lahan “Tetelan” adalah berada pada kategori “sedang” yaitu dengan skor 15,86. Dengan masing-masing nilai indikator kesesuaian sebagai berikut: indikator jumlah pinus yang hidup sebesar 2,7 atau 91% kategori tinggi, indikator kondisi kanopi yang disebabkan perempesan sebesar 2,6 atau 87% kategori tinggi, indikator jenis tanaman pertanian sebesar 1,3 atau 42% kategori rendah, indikator jarak tanam sebesar 2,9 atau 96 % kategori tinggi, indikator penyiangan sebesar 1,6 atau 2% kategori sedang, indikator pengolahan lahan lahan sebesar 1,4 atau 47% kategori rendah, indikator pemupukan sebesar 1,3 atau 45% kategori rendah dan indikator menanam kopi sebesar 2 atau 67% katagori sedang. Sedangkan pada kemitraan penyadap pelaksanaanya cukup baik, semua anggota penyadap telah memahami dan menerapkan bagaimana cara menyadap yang baik agar pohon pinus tetap lestari.
3. Terdapat perbedaan hasil pendapatan dari kedua jenis kemitraan yang diikuti oleh petani dalam program PKPH di Desa Kucur. Hasil analisis

pendapatan usahatani dalam kemitraan lahan “Tetelan” per petani per ha adalah sebesar Rp14.161.137,00 selama 8 bulan atau dengan pendapatan per bulan per ¼ ha sebesar Rp442.540,00. Sedangkan pada analisis pendapatan kemitraan penyadap getah pinus selama 8 bulan adalah sebesar Rp1.980.000,00 atau setiap bulan per penyadap mendapat pendapatan sebesar Rp245.500,00. Perbedaan pendapatan antara kedua kemitraan ini cukup jauh yaitu memiliki jarak 2x lipat. Hal ini disebabkan oleh petani penyadap memang lebih fokus pada kegiatan kemitraan usahatani di lahan “Tetelan”.

## 6.2. Saran

Dari hasil penelitian di atas maka dapat dirumuskan saran praktis dan saran akademis. Adapun saran praktis agar program PKPH bisa menjadi lebih baik adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan perbaikan peran LKDPH sebagai lembaga resmi pengelolaan hutan dari masyarakat desa. Perbaikan tersebut antara lain dengan melakukan pendataan yang baik terhadap petani anggota kemitraan. Selain itu juga perlu membuat agenda pertemuan yang pasti dan rutin yang selama ini tidak dilakukan baik antar anggota petani kemitraan maupun pihak Perum Perhutani. Utamanya pada kemitraan penggarap lahan “Tetelan” yang memiliki banyak anggota dan memiliki risiko yang besar terhadap isu kelestarian hutan. Dengan adanya pendataan serta agenda pertemuan anggota yang jelas akan memudahkan kontrol pelaksanaan program serta dapat menjadi momen bagi seluruh anggota untuk saling berbagi dalam mengatasi isu kesejahteraan masyarakat.
2. Pemahaman petani terhadap isu kelestarian yang selama sudah cukup baik perlu ditingkatkan karena meskipun mereka menyadari pentingnya kelestarian hutan tetap saja terkadang dengan alasan ekonomi dan ikut-ikutan petani yang lain mereka juga ikut melanggar.
3. Dalam usaha meningkatkan kesesuaian implementasi program PKPH utamanya pada aspek kelestarian adalah dengan menggalakan penanaman kopi. Sebagai pihak yang memiliki kemampuan lebih secara modal Perum

Perhutani dapat membantu para petani menyediakan bibit kopi yang selama ini menjadi keluhan oleh petani.

Serta adapun saran akademis untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian tentang kemitraan yang lebih mengarah pada aspek sosial dan kelestarian alam masih relatif jarang diungkap, demikian juga referensi yang penulis dapatkan masih sangat terbatas. Oleh karena itu selain penelitian ini diharapkan terdapat penelitian lain yang sifatnya melanjutan, melengkapi, menyempurnakan.
2. Pada penelitian ini dalam menganalisis kesesuaian pelaksanaan PKPH berdasarkan aspek kelestarian menggunakan 8 indikator saja. Mungkin pada penelitian berikutnya bisa memasukan indikataor lain yang tentunya lebih presentatif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achirrudin, D. R. 2011. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Bagian Kestauan Pemangkuan Hutan Temanggung dalam Rangka Pelestarian Hutan Lindung di Gunung Sumbing-Sindoro[Tesis]. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Aji, G. B., Suryanto, J., Yulianti, R., Wirati, A., Abdurrahim, A. Y., Miranda, T. I. 2011. Strategi Penguraangan Kemiskinan di Desa-Desa Sekitar Hutan. Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Anomsari, E. T. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (studi kasus di Kecamatan Karanggayam, Kebumen).
- Ansori, M., Soetarto, E., Darusman, D., Sundawati, L., 2009. Pengelolaan Hutan Kemitraan untuk Menyejahterakan Rakyat (Kasus PHBM di Perhutani BKPH Parung Panjang, KPH Bogor). Fakultas Ekologi Pertanian dan Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Aryadi, M. 2012. Hutan Rakyat: Fenomonologi Adaptasi Budaya Masyarakat. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah: Malang.
- Awang., Andayani, W., Himmah, B Widayanti, W.T., Affianti, A. 2002. Hutan Rakyat (Sosial Ekonomi dan Pemasaran). BPFE: Yogyakarta.
- Bachriadi, D. 1995. Ketergantungan Petani dan penetrasi Kapitalis (lima kasus Intensifikasi pertanian dengan Pola Contract Farming). Yayasan AKATIGA: Bandung.
- Hafsah, J. M. 1999. Kemitraan Usaha, Konsepsi dan Strategi. Penerbit Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- Hairiah, K., Agung, M., Sabarnurdin, S. 2003. Pengantar Agroforestry, ICRAF World Agroforestry Centre.
- Khususiyah, N. 2013. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di DAS Konto Malang Pembelajaran Keberhasilan dan Kegagalan Program. World Agroforestry Centre (ICRAF).

- Kusdamayanti. 2008. Peran Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Sosiasl Ekonomi Kehutanan* Vol. 5 No. 2 Juni 2008, Hal. 111-124.
- Mahendra, F. 2009. *Sistem Agroforestri dan Aplikasinya*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Makeham, J.P dan R.L Malcolm. (1991). *Manajemen Usahatani Daerah Tropis*. Diterjemahkan oleh Basilius B.Teku. LP3ES: Jakarta.
- Miles, B. Mathew dan A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif* . Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Nurjaya 2005. Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia. *Jurnal JURISPRUDENCE* Vol 2 No.1 Maret 2005. Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Perum Perhutani, 2009. *Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*; Jakarta.
- ,2014. PHBM Sub portal BUMN. [www.BUMN.go.id](http://www.BUMN.go.id).copyright@20014. Perum Perhutani. (diakses 28 Januari 2016)
- Puspawati, 2004. Analisis Kemitraan antara PT. Petani (Persero) dengan Petani Penangkar Benih Padi di Kabupaten Karawang. Tesis Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Riyanto, B. 2004. *Selayang Pandang Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia*. Penerbit Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan: Bogor.
- Salim, 2003. *Dasar- Dasar Hukum Kehutanan*. Edisi Revisi Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset: Jakarta.
- Soekartawi. 1986. *Ilmu Usahatani dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil*. UI-Press: Jakarta.
- Sugiyono. (2008). *Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.Bandung.
- Sulistiyani, A. (2004) *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gaya Media: Yogyakarta.
- Sutawi. 2002. *Manajemen Agribisni*. UMM Press: Malang.
- Theresia, C. C. 2008. Efektifitas Pengelolaan Hutan Kolaboratif antara Masyarakat dengan Perum Perhutani kasus PHBM di KPH Kuningan dan

KPH Majalengka Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Skripsi Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1967. Tentang Ketentuan-Kerentuan Pokok Kehutanan.

\_\_\_\_\_ No. 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Yuwono, S. 2006. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatra Selatan. Tesis Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Zain, M. R., Soeaidy, S., Mindarti, L. I. 2013. Keitraan antara KPH Perhutani dan LMDH dalam Menjaga Kelestarian Hutan (Studi pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tunggunggunung Kabupaten Tulungagung). Fakultas Ilmu Admistrasi. Universitas Brawijaya. Malang.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



LAMPIRAN

